



## KATA PENGANTAR

Ucapan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT karena Alhamdulillah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 telah selesai penyusunannya, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk tahun berikutnya. Laporan ini merupakan pelaksanaan atas Perjanjian Kinerja Kabupaten Pasaman Tahun 2017 yang berdasarkan RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021.

Laporan Kinerja Kabupaten Pasaman Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan petunjuk teknis Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan pedoman kepada Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 merupakan wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah Kabupaten Pasaman kepada stakeholders baik Instansi Pemerintah Pusat, Daerah dan masyarakat dan juga merupakan sumber informasi Pemerintah Kabupaten Pasaman sebagai bahan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja ini juga menjelaskan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2017, sedangkan capaian kinerja (*performance result*) adalah hasil realisasi dari rencana kinerja tersebut. Informasi kinerja juga menggambarkan indikator sasaran yang capaian kinerjanya memenuhi target yang ditetapkan dan indikator sasaran yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan serta penjelasan-penjelasan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 ini, diucapkan terima kasih.

Lubuksikaping,     Maret 2018

BUPATI PASAMAN

YUSUF LUBIS



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN PASAMAN .....	2
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>24</b>
A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....	24
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	37
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 .....	39
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>46</b>
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 .....	45
1. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2017 .....	83
2. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	83
3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI .....	84
4. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA .....	85
5. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN .....	85
B. REALISASI ANGGARAN .....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1 Nama Kecamatan, Luas, Jumlah Nagari dan Jumlah Jorong .....	2
Tabel 2 Luas Wilayah Kabupaten Pasaman Menurut Tingkat Kemiringan Lahan .....	5
Tabel 3 Ketinggian Masing-Masing Kecamatan .....	6
Tabel 4 Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2012-2016 .....	14
Tabel 5 Angka Melek Huruf, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, APK dan APM .....	16
Tabel 6 Perkembangan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pasaman Tahun 2011-2016	18
Tabel 7 Perkembangan Pendidikan Menengah di Kabupaten Pasaman Tahun 2011-2016 .....	19
Tabel 8 Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Berdasarkan Tingkat Golongan .....	22
Tabel 9 Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Berdasarkan Eselon .....	22
Tabel 10 Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	23
Tabel 11 Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	33
Tabel 12 Persandingan Misi dengan Agenda Prioritas.....	36
Tabel 13 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021.....	37
Tabel 14 Perjanjian Kinerja Kabupaten Pasaman Tahun 2016 .....	37
Tabel 15 Sasaran Strategis 1 .....	39
Tabel 16 Sasaran Strategis 2 .....	49
Tabel 17 Sasaran Strategis 3 .....	50
Tabel 18 Sasaran Strategis 4 .....	51
Tabel 19 Sasaran Strategis 5 .....	52
Tabel 20 Sasaran Strategis 6 .....	53
Tabel 21 Sasaran Strategis 7 .....	53
Tabel 22 Sasaran Strategis 8 .....	54
Tabel 23 Sasaran Strategis 9 .....	55
Tabel 24 Sasaran Strategis 10 .....	57
Tabel 25 Sasaran Strategis 11 .....	58
Tabel 26 Sasaran Strategis 12 .....	59
Tabel 27 Sasaran Strategis 13 .....	60



Tabel 28	Peningkatan Produksi Pertanian .....	60
Tabel 29	Sasaran Strategis 14 .....	61
Tabel 30	Sasaran Strategis 15 .....	63
Tabel 31	Produksi Perikanan di Kabupaten Pasaman .....	63
Tabel 32	Sasaran Strategis 16 .....	64
Tabel 33	Sasaran Strategis 17 .....	65
Tabel 34	Sasaran Strategis 18 .....	66
Tabel 35	Sasaran Strategis 19 .....	68
Tabel 36	Sasaran Strategis 20 .....	70
Tabel 37	Sasaran Strategis 21 .....	71
Tabel 38	Sasaran Strategis 22 .....	73
Tabel 39	Sasaran Strategis 23 .....	74
Tabel 40	Sasaran Strategis 24 .....	75
Tabel 41	Sasaran Strategis 25 .....	75
Tabel 42	Sasaran Strategis 26 .....	78
Tabel 43	Sasaran Strategis 27 .....	80
Tabel 44	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015	81
Tabel 45	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 .....	83
Tabel 46	Akuntabilitas Keuangan .....	84
Tabel 47	Permasalahan Solusi .....	86
Tabel 48	Realisasi Anggaran Tahun 2016 .....	93
Tabel 49	Capaian Kinerja .....	96



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan selanjutnya sebagai petunjuk teknis penyusunan dijelaskan dengan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu ats Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan permasalahan utama yang merupakan isu strategis untuk saat ini adalah bagaimana mewujudkan visi misi pemerintah dalam rangka meningkatkan masyarakat Kabupaten Pasaman yang maju dan berkeadilan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan



sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

## B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

### 1. Dasar Hukum

Kabupaten Pasaman secara yuridis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348)

### 2. Aspek Geografi dan Demografi

#### a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pasaman merupakan daerah yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lain baik yang berada dalam lingkup Sumatera Barat maupun lainnya. Bahkan Kabupaten Pasaman merupakan pintu gerbang bagian Utara Sumatera Barat dengan berbatasan langsung dengan Sumatera Utara. Luas Kabupaten Pasaman adalah 3.947,63 Km<sup>2</sup>. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Mapat Tunggul dengan luas 605,29 Km<sup>2</sup> atau sebesar 15,33% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman dan terdiri dari tiga nagari dan 15 jorong. Kecamatan Simpang Alahan Mati, merupakan kecamatan dengan wilayah paling sempit, yaitu 69,56 Km<sup>2</sup> atau hanya 1,76% dari total luas wilayah Kabupaten Pasaman, dan terdiri dari dua nagari dan sembilan jorong. Luas wilayah, jumlah nagari dan jorong pada setiap kecamatan di Kabupaten Pasaman secara lengkap sebagaimana tersaji pada Tabel

**Tabel 1**  
**Nama Kecamatan, Luas, Jumlah Nagari, dan Jumlah Jorong**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Nagari	Jumlah Jorong
			(Km <sup>2</sup> )	(%)		
1	Bonjol	Bonjol	194,32	4,92	4	30
2	Tigo Nagari	Ladang Panjang	352,92	8,94	3	13



3	Simpang Alahan Mati	Simpang	69,56	1,76	2	9
4	Lubuk Sikaping	Lubuk Sikaping	346,50	8,78	6	32
5	Dua Koto	Simpang Tigo Andilan	360,63	9,14	2	21
6	Panti	Panti	212,95	5,39	3	9
7	Padang Gelugur	Tapus	159,95	4,05	4	4
8	Rao	Rao	236,18	5,98	2	18
9	Mapat Tunggul	Guo	605,29	15,33	3	15
10	Mapat Tunggul Selatan	Silayang	471,72	11,95	2	11
11	Rao Selatan	Lansad Kadap	338,98	8,59	3	23
12	Rao Utara	Koto Rajo	598,63	15,16	3	24
Jumlah			3.947,63	100,00	37	209

Sumber : Pasaman Dalam Angka 2017

Adapun yang menjadi batas-batas wilayah Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas (Sumatera Utara).
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Agam.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Rokan Hulu ( Riau).
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mandailing Natal ( Sumatera Utara).

## b. Letak dan Kondisi Geografis

### 1) Letak

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/kota yang terletak di ujung Utara dengan ibu kotanya Lubuk Sikaping. Kabupaten Pasaman terletak pada posisi strategis sebagai pintu gerbang Sumatera Barat dari arah Utara yang dilalui oleh garis khatulistiwa dengan posisi dan batas wilayah sebagai berikut :

Letak Geografis :  $0^{\circ}55'$  LU s/d  $0^{\circ}06'$  LS,  $99^{\circ}45'$  BT s/d  $100^{\circ}21'$  BT

Ketinggian : 50 M s/d 2.912 M dpl

Selanjutnya untuk lebih jelasnya mengenai letak geografis Wilayah Kabupaten Pasaman terutama wilayah kecamatan serta batas wilayah





Daerah Kabupaten Pasaman memiliki bentang alam yang cukup beragam. Jenis kemiringan yang paling dominan adalah kemiringan lebih dari 40%, yang terbentang seluas 267.650,85 Ha atau mencapai 67,80% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Pasaman. Daerah ini juga memiliki lereng yang sangat terjal terutama yang terletak di Kecamatan Rao Utara, Rao, Rao Selatan, Mapat Tunggul dan Mapat Tunggul Selatan. Selanjutnya Lereng Datar (0-8%) seluas 61.105 Ha atau 15,48% berada di Kecamatan Tigo Nagari, Bonjol, Lubuk Sikaping, Panti, Padang Gelugur, sebagian kecil Rao Selatan dan Kecamatan Dua Koto. Daerah ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya tanaman pangan. Di samping itu, kelerengan lain yang juga dapat diperkenankan untuk kegiatan budidaya tanaman pangan adalah 8–15% dan 15–25%, namun wilayah ini relatif tidak terlalu luas, masing-masing hanya 3,03% dan 4,88% dari total luas wilayah.

Berdasarkan hasil Interpretasi Peta Topografi, skala 1 : 50.000 yang dipublikasikan oleh Jantop TNI-AD tahun 1982 menunjukkan bahwa kondisi kemiringan lahan Wilayah Kabupaten Pasaman dikelompokkan atas 5 kelas kemiringan lahan yaitu 0-2 % (datar), 2-5% (agak landai), 5-8 % (landai), 8-15 % (agak curam), 15-40 % (curam) dan > 40% (sangat curam). Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat kemiringan lahan yang terdapat di Kabupaten Pasaman dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2**  
**Luas Wilayah Kabupaten Pasaman Menurut Tingkat Kemiringan Lahan**

No	Kelerengan Lahan	Luas	
		(Ha)	(%)
1	Datar (0-2 %)	312,31	7,91
2	Agak Landai (2-5 %)	8,06	0,20
3	Landai (5-8 %)	93,21	2,36
4	Agak Curam (8-15%)	102,86	2,61
5	Curam (15-40 %)	497,79	12,61
6	Sangat Curam (lebih dari 40 %)	2.933,41	74,31
Jumlah		3.947,64	100,00

Sumber : Jantop TNI-AD 1982

Kabupaten Pasaman berada pada ketinggian 50 – 2.912 m dari permukaan laut. Dalam penetapan regionalisasi ketinggian digunakan klasifikasi menurut Wilayah Tanah Usaha. Berdasarkan hal tersebut,



ketinggian masing-masing kecamatan di wilayah ini seperti yang disajikan pada Tabel 3

**Tabel 3**  
**Ketinggian Masing-Masing Kecamatan**

No	Kecamatan	Ketinggian (Dpl)
1	Bonjol	100 – 1.160
2	Lubuk Sikaping	235 - 2.340
3	Tigo Nagari	50 - 2.912
4	Panti	221 - 1.521
5	Dua Koto	300 - 2.172
6	Rao	250 - 1.220
7	Mapat Tunggul	150 - 2.281
8	Mapat Tunggul Selatan	150 - 2.281
9	Rao Utara	360 - 1.886
10	Rao Selatan	252 - 1.100
11	Padang Gelugur	250 - 1.220
12	Simpang Alahan Mati	100 - 890
JUMLAH		50 – 2.912

Sumber : Pasaman Dalam Angka, 2016

### 3) Klimatologi

Kabupaten Pasaman secara umum mempunyai suhu rata-rata 20°C - 26°C dengan jumlah rata-rata hari hujan 16,39 hari/bulan.

### 4) Hidrologi

Di wilayah Kabupaten Pasaman banyak terdapat sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil yang tersebar di setiap kecamatan. Beberapa sungai besar yang penting adalah Batang Sumpur, Batang Masang, Batang Pasaman, Batang Sontang, Batang Asik, Batang Bindalik, Batang Alahan Panjang, Batang Tibawan, dan Batang Kampar. Kecamatan Tigo Nagari merupakan kecamatan yang paling banyak sungainya (51 sungai) dan diikuti oleh Kecamatan Bonjol (29 sungai). Sungai-sungai yang terdapat di Kecamatan Mapat Tunggul merupakan daerah hulu sungai-sungai besar yang mengalir ke wilayah Riau dan Kabupaten 50 Kota.



## 5) Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Pasaman didominasi oleh hutan dengan luas wilayah 190,427,66 ha atau 48,24 % dari jumlah luas kawasan Kabupaten Pasaman. Sedangkan penggunaan lahan terkecil menurut jenis penggunaannya berada pada kawasan industri yakni 34,40 ha atau 0,01 % dari luas lahan keseluruhan.

### a) Potensi Galian Mineral Non Logam

Wilayah Kabupaten Pasaman yang demikian luas, juga mengandung berbagai jenis bahan galian dan tambang. Sumberdaya ekonomi ini sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai basis ekonomi masyarakat, namun pemanfaatan potensi bahan tambang yang sudah teridentifikasi tersebut masih terkendala, karena posisi lokasi berada pada kawasan hutan lindung.

### b) Pertanian

Secara umum komoditas pertanian yang diusahakan di Kabupaten Pasaman dapat digolongkan kepada kelompok komoditas yaitu; (a) Kelompok Pangan Utama (makanan), (b) Kelompok Perkebunan, (c) Kelompok Peternakan, dan (d) Kelompok Perikanan.

#### (1) Kelompok komoditi pangan utama (makanan)

Kelompok bahan makanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dimasa mendatang di kabupaten Pasaman adalah Padi, Jagung dan Kacang Tanah. Hal ini terlihat disamping pertumbuhan produksinya yang cukup stabil, juga mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Disamping itu, lahan untuk mengembangkan produksi kelompok bahan makanan ini juga tersedia secara memadai.

(a) Komoditi bahan makanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah komoditi padi. Perkembangan produksi padi di Kabupaten Pasaman tampaknya memang belum menggembirakan. Hal ini terbukti dari pertumbuhan produksi padi yang masih relatif rendah, dimana secara rata-rata hanya sebesar 4,23% saja. Kenyataan ini tampaknya disebabkan oleh masih rendahnya tingkat produktifitas lahan, dimana



secara rata-rata juga berada dibawah 5 ton per-hektar. Rendahnya produktifitas lahan per-hektar ini sudah tentu tidak terlepas dari masih rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan produksi padi.

(b) Masih rendahnya produktifitas padi ini adalah wajar saja terjadi sebab sebagian besar dari petani padi ini memiliki pendidikan yang masih sangat rendah. Disamping tingkat pendidikan petani yang rendah, pengetahuan tentang teknologi pertanian yang masih minim serta upaya mereka dalam meningkatkan produktifitas juga rendah. Artinya usaha bertani padi bukanlah merupakan usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh, tetapi sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Disamping itu, lahan yang tersedia untuk masing-masing petani padi juga masih relatif terbatas, sebab sebagian besar para petani hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 Ha.

(c) Komoditi jagung juga merupakan salah satu jenis bahan makanan yang sangat potensial untuk dikembangkan. Pengembangan komoditi jagung ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para petani dan sekaligus dapat mendukung pengembangan peternakan ayam. Suatu hal yang berbeda dengan produksi padi, ternyata produksi jagung mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini terbukti dari pertumbuhan produksi jagung secara rata-rata yang sangat tinggi, dimana secara rata-rata mencapai sebesar 49,79 % per-tahun. Potensi pengembangan produksi jagung ini juga dapat diselaraskan dengan usaha pengembangan peternakan. Sebab semakin tumbuh dan berkembang pengembangan komoditi jagung, maka akan semakin tersedia pula salah satu bahan makanan bagi ternak.

Disamping itu, produktifitas lahan jagung dalam menghasilkan jagung tampaknya juga masih relatif rendah. Selama periode tahun 2010-2015 rata-rata produktifitas komoditi jagung baru mencapai sebesar 5,16 ton per-hektar. Artinya peluang untuk meningkatkan produksi jagung di Kabupaten Pasaman adalah



cukup tinggi. Selanjutnya pengembangan produksi jagung memiliki peluang untuk menumbuhkan berbagai macam jenis usaha lainnya baik berupa usaha berbagai macam jenis makanan dari jagung, seperti usaha industri pengolahan makanan dari jagung serta usaha mendukung usaha peternakan. Kemudian pengembangan komoditi jagung juga memiliki resiko yang relatif kecil dibandingkan dengan jenis komoditi lainnya, sebab komoditi ini bisa disimpan tahan lama.

- (d) Kacang tanah juga merupakan salah satu komoditi yang memiliki potensi untuk ditumbuhkembangkan di daerah Kabupaten Pasaman. Untuk pengembangan komoditi ini lahan juga cukup tersedia, hal ini terbukti dari pertumbuhan produksi kacang tanah secara rata-rata mencapai sebesar 2,49 % per-tahun meskipun lahan yang dimiliki oleh masing-masing petani juga masih terbatas. Disamping itu produktifitas lahan dalam menghasilkan kacang tanah juga masih sangat rendah, dimana secara rata-rata selama periode 2010-2015 baru mencapai sebanyak 1,82 ton per-hektar.

Kenyataan ini memberikan gambaran masih ada peluang untuk meningkatkan produksi kacang tanah ini dimasa mendatang. Disamping itu pengembangan komoditi kacang akan dapat mendukung industri kecil (industri rumah tangga) yang menghasilkan aneka ragam produk dari bahan kacang.

## **(2) Komoditi Kelompok Perkebunan**

Kondisi alam sangat mendukung pengembangan komoditi perkebunan di Kabupaten Pasaman. Paling tidak ada 3 (tiga) komoditi perkebunan yang sangat berpotensi dikembangkan, yaitu Karet, Kelapa Sawit, dan Kakao.

- (a) Komoditi karet merupakan salah satu komoditi yang cukup potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Pasaman. Perkembangan pertumbuhan produksi karet ini memang masih rendah, dan begitu juga dengan produktifitasnya. Selama periode 2010-2015 ternyata pertumbuhan produksi karet secara rata-rata per tahun adalah 9,84%. Pertumbuhan



produksi ini dari tahun ke tahun tampaknya mengalami penurunan yang cukup serius. Pada tahun 2010 pertumbuhan produksi karet mencapai sebesar 5,73% dan kemudian meningkat tajam menjadi 42,29% pada tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kemampuan SDM petani karet dalam mengembangkan usaha perkebunan, juga pemakaian bibit karet yang unggul atau bagus oleh para petani serta pembinaan dan pendampingan yang secara komprehensif selalu dilakukan oleh dinas teknis terkait. Kondisi yang demikian jelas akan memberikan peluang untuk mengembangkan produksi karet dimasa mendatang bila kualitas Sumber Daya Manusia dan juga pemakaian bibit unggul bisa menjadi perhatian yang serius.

Selanjutnya, usaha perkebunan karet juga telah dikelola secara profesional, disamping melalui sistim pola tradisional juga telah menggunakan pola teknologi tepat guna, sehingga produktifitas yang dihasilkan dari lahan karet secara perlahan terus meningkat. Dengan demikian suatu hal yang cukup menggembarakan karena perkembangan produksi karet dari tahun ketahun ternyata selalu mengalami peningkatan. Hal ini memberikan indikasi bahwa peluang untuk mengembangkan komoditi karet memiliki prospek yang cukup bagus dimasa mendatang.

- (b) Komoditi sawit juga merupakan salah satu komoditi yang sudah tumbuh dan berkembang di Kabupaten Pasaman selama ini. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Pasaman memiliki sumber mata pencahariannya sebagai petani sawit. Namun demikian sampai saat ini pengembangan produksi komoditi sawit ini tampaknya belumlah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini tampaknya disebabkan oleh belum maksimumnya pengelolaan kebun sawit yang dilakukan oleh para petani. Terlihat dari pertumbuhan produksi sawit secara rata-rata yang masih berada dibawah 5 % per-tahun.



- (c) Komoditi kakao juga merupakan salah satu komoditi yang cukup potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Pasaman terutama di Kecamatan Rao. Kondisi dan potensi lahan untuk berproduksi tampaknya cukup memadai, dan masyarakat juga sudah mulai mengembangkan komoditi ini sebagai komoditi unggulan daerah. Disamping itu, produksi kakao ini selama periode 2010-2015 kelihatannya meningkat secara terus menerus, namun dengan pertumbuhan yang masih sangat rendah.

Berdasarkan hasil perhitungan, pertumbuhan rata-rata produksi kakao di Kabupaten Pasaman selama periode 2010-2015 hanya sebesar 5,42% per tahun. Rendahnya laju pertumbuhan produksi ini sudah tentu disebabkan oleh rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia petani pengelolanya yang belum memiliki keahlian serta belum profesional dalam mengelolanya. Hal ini juga terbukti dengan masih sangat rendahnya tingkat produktifitas lahan yang mampu menghasilkan kakao untuk setiap hektar hasil produksinya. Untuk lebih

### **(3) Peternakan**

Beberapa jenis peternakan juga merupakan potensi daerah yang dapat dikembangkan di Kabupaten Pasaman, seperti sapi, kerbau dan kambing. Perkembangan jumlah produksi sapi, kerbau, dan kambing di Kabupaten Pasaman tahun 2010-2015

### **(4) Perikanan**

Kondisi alam Kabupaten Pasaman sangat sesuai dengan budidaya perikanan, baik perikanan di kolam, sawah, maupun perairan umum. Perkembangan jumlah produksi perikanan kolam, perikanan sawah, dan perikanan perairan umum di Kabupaten Pasaman Tahun 2010-2015



### 3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Bagian ini fokus pada aspek kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi yang merupakan indikator yang menentukan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pemerataan ekonomi, seni budaya dan olah raga.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standard hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Secara umum, pembangunan manusia Kabupaten Pasaman terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2017. Namun demikian jika kita bandingkan dengan IPM Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat, IPM Kabupaten Pasaman termasuk rendah karena berada pada urutan ke 18 dari 19 Kabupaten dan Kota atau dengan kata lain IPM Kabupaten Pasaman tahun 2017 sebesar 64,01 hanya berada setingkat diatas Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan IPM sebesar 57,41. Begitu juga jika kita bandingkan dengan IPM Provinsi Sumatera Barat maka IPK Kabupaten Pasaman cukup jauh berada di bawah IPM Provinsi yang sudah mencapai 69.55.

Kenaikan IPM Kabupaten Pasaman adalah dari 60,88 pada tahun 2010 menjadi 64,01 pada tahun 2017. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Pasaman rata-rata tumbuh sebesar 0,63 persen per tahun. Pada periode 2011-2012, IPM Kabupaten Pasaman tumbuh 0,69 persen. Pertumbuhan pada periode tersebut lebih



tinggi apabila dibandingkan periode 2013-2014 yang hanya tumbuh sebesar 0,42 persen.

**a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

**1) Pertumbuhan PDRB**

Sampai tahun 2016, sektor penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pasaman adalah pertanian, kehutan dan perikanan. Sementara sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan, begitu juga dengan industri pengolahan. Sementara itu sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor relatif konstan. Untuk lebih rinci bisa dilihat pada tabel bawah.



**Tabel 4**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah dan Presentase)**  
**Atas dasar Harga Konstan Tahun 2012-2016 Kabupaten Pasaman**

No	Lapangan Usaha	2012		2013		2014		2015		2016	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.243.921,5	52,08	2.337.101,0	51,23	2.486.390,6	51,51	2.601.935,2	51,17	2.681.511,79	50,20
2	Pertambangan dan Penggalian	84.268,0	1,96	89.616,6	1,96	94.379	1,96	100.740,6	1,98	105.790,56	1,98
3	Industri Pengolahan	218.314,3	5,07	232.906,4	5,10	241.569,9	5,00	248.872,7	4,89	262.940,78	4,92
4	Pengadaan Listrik dan gas	672,3	0,02	696,6	0,02	737,9	0,02	750	0,01	901,17	0,02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.452,9	0,10	4.722,8	0,10	5.056,1	0,10	5.330,1	0,10	5.654,13	0,11
6	Konstruksi	183.747,3	4,26	208.062,5	4,56	208.568,5	4,32	223.543,3	4,40	239.705,49	4,49
7	Perdagangan Besar dan Eceeran; Reperasi Mobil dan Sepeda motor	543.670,3	12,62	587.011,9	12,9	621.846	12,88	657.985,7	12,94	703.919,70	13,18
8	Transportasi dan Pergudangan	172.904,6	4,01	190.667,9	4,19	205.511,7	4,26	220.772,9	4,34	241.469,15	4,52
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Mnum	31.464,3	0,73	33.325,7	0,73	35.268,8	0,73	37.547,1	0,74	41.282,02	0,77
10	Informai dan Komunikasi	192.519,7	4,47	212.014,2	4,65	228.624,6	4,74	249.734,1	4,91	271.734,62	5,09
11	Jasa Keunagan dan Asuransi	102.053,5	2,37	110.732,2	2,43	117.995,2	2,44	122.264,1	2,40	132.272,33	2,48
12	Real Estat	58.887,9	1,37	61.783,1	1,35	64.866,2	1,34	68.652,8	1,35	72.852,78	1,36
13	Jasa Perusahaan	2.256,4	0,25	2.383,3	0,25	2.522,2	0,05	2.667,7	0,05	2.817,62	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib	313.196,1	7,27	325.975,9	7,14	336.988	6,98	351.439,2	6,91	369.445,62	6,92
15	Jasa Pendidikan	82.877,4	1,92	88.279,5	1,93	95.191,6	1,97	104.615,8	2,06	114.913,97	2,15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	38.695,6	0,90	41.760,1	0,92	44.076,7	0,91	47.527,3	0,93	50.359,00	0,94
17	Jasa Lainnya	35.088,0	0,81	35.855,1	0,79	37.728,5	0,78	40.248,5	0,79	44.225,09	0,83

Sumber: PDRB Kabupaten Pasaman Tahun 2012-2016



## 2) Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan salah satu indikator untuk menentukan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Sebab bila tingkat inflasi pada suatu daerah tinggi, maka kesejahteraan masyarakatnya akan mengalami penurunan, sebab daya beli masyarakat akan juga menurun. Suatu hal yang cukup menggembirakan di Kabupaten Pasaman, selama periode 2012-2017 ternyata laju inflasi boleh dikatakan relatif rendah. Sebab selama periode tersebut laju inflasi hanya 1 digit saja atau berada dibawah 10 %.

Selama periode 2012-2017 tingkat inflasi selalu berada dibawah (dua) digit. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Berdasarkan data dari Bank Indonesia laju inflasi di kabupaten tampaknya berfluktuasi. Pada tahun 2010 angka inflasi berdasarkan indeks harga konsumen di Kabupaten Pasaman adalah sebesar 7,84 %, dan kemudian turun menjadi sebesar 4,16 % pada tahun 2012. Akan tetapi pada tahun 2017 angka inflasi di Kabupaten Pasaman meningkat kembali menjadi sebesar 8,70 %. Hal ini berarti secara umum tingkat inflasi masih dianggap belum berpengaruh besar terhadap penurunan daya beli masyarakat, selama pendapatan masyarakat masih tetap dari tahun ketahun.

### b. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indicator pada bidang pendidikan yaitu :

#### 1) Bidang Pendidikan

Bila diperhatikan angka melek huruf di Kabupaten Pasaman terus meningkat. Pada tahun 2016 angka melek huruf sudah mencapai 98,18 %. Angka ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan pada tahun 2010 dimana angka melek huruf masih sekitar 94,20 %. Disamping itu Angka Partisipasi Kasar (APK),Angka Partisipasi Murni (APM)



disemua tingkat pendidikan terus meningkat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5  
Angka Melek Huruf, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, APK dan APM

1.	BIDANG URUSAN PENDIDIKAN		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	Angka melek huruf	94,20	85,70	90,00	92,80	95,00	98,18
	2	Angka rata-rata lama sekolah	7,26	7,37	7,48	7,60	7,62	7,63
	3	Angka partisipasi kasar						
	1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	100	109,18	95,39	95,16	100,00	100,3
	2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	100	105,00	102,00	96,16	100,00	97,06
	3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	50,99	57,97	63,49	64,11	66,10	50,99
	4	Angka pendidikan yang ditamatkan						
	5	Angka Partisipasi Murni						
	1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100	100,00	86,98	89,36	100,00	95,60
	2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	100	100,00	102,80	94,30	100,00	85,90
	3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	87	87,50	87,80	87,90	88,00	87,00

## 2) Angka Layanan Kesehatan , Kelangsungan Hidup Bayi dan Angka Usia Harapan Hidup

### (a) Layanan Kesehatan

Untuk mewujudkan masyarakat sehat dan produktif, Pemerintah Kabupaten Pasaman berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan. Dalam kerangka memberikan pelayanan kesehatan yang baik, Pemerintah berupaya untuk menyediakan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan paramedik.

Di Kabupaten Pasaman dari tahun 2012-2017 angka balita terus meningkat. Pada tahun 2010 angka balita mencapai 26.635 dan ini terus meningkat setiap tahun sehingga mencapai 35.014. Sementara



pertumbuhan posyandu juga terus bertambah cukup signifikan. Jika pada tahun 2010 jumlah Pos Yandu di Kabupaten Pasaman sebanyak 345 unit, maka pada tahun 2017 meningkat menjadi 402 unit.

Disamping itu persoalan mendasar yang juga dihadapi oleh dunia kesehatan di Kabupaten Pasaman adalah dalam hal jumlah Rumah Sakit. Dari tahun 2011 sampai 2017 jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Pasaman tetap hanya 1 unit, yaitu Rumah Sakit Daerah Lubuk Sikaping. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis tentu hal ini belum memadai. Ini sesungguhnya menjadi tantangan bagi Pemerintah kedepan dalam menyediakan sarana pelayanan kesehatan khususnya Rumah Sakit bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman.

Selanjutnya untuk jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) selama tahun 2011 sampai tahun 2017 mengalami perubahan yang cukup signifikan khususnya puskesmas pembantu. Jumlah puskesmas pada Tahun 2011 sampai tahun 2017 tidak mengalami penambahan dari 16 unit, sedangkan puskesmas pembantu mengalami kenaikan dari 42 unit pada tahun 2011 menjadi 52 unit tahun 2017

#### **(b) Kelangsungan Hidup Bayi**

Pada tahun 2011-2016 AKB mengalami penurunan, dari 43 kasus menjadi 11 kasus. Penurunan angka kematian bayi sangat berpengaruh pada kenaikan umur harapan hidup waktu lahir. Meningkatnya umur harapan hidup secara tidak langsung juga memberi gambaran tentang peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.

#### **(c) Angka Usia Harapan Hidup**

Pada aspek kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan perkiraan rata-rata lama hidup dari kelahiran penduduk. Capaian rata-rata AHH pada tahun 2012-2017 mengalami peningkatan rata-rata 0,14. Dimana pada tahun 2010 AHH Kabupaten Pasaman adalah 65,55 tahun dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 66,26 tahun. Faktor-faktor yang berpengaruh dominan pada capaian AHH



adalah Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Kematian Ibu (AKI), status gizi bayi dan balita, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan tingkat pendidikan atau wawasan ibu yang sedang hamil, mempunyai bayi, dan balita.

#### 4. Aspek Pelayanan Umum

##### a. Pendidikan

##### 1) Pendidikan Dasar

Perkembangan indikator pendidikan dasar dari tahun 2012-2017 di Kabupaten Pasaman dapat diukur berdasarkan indikator angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah, rasio guru dengan murid serta rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata.

Angka partisipasi sekolah dasar merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dasar. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Angka partisipasi sekolah dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Sedangkan rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Perkembangan pendidikan dasar di Kabupaten Pasaman tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 6**

Perkembangan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pasaman Tahun 2012-2017

NO	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	Angka Partisipasi Sekolah	89,96	90,15	90,37	90,45
2	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah	1 : 225,4	1 : 225,3	1 : 225,0	1 : 224,9	1 : 224,4	1 : 224,5
3	Rasio Guru Terhadap Murid	1 : 24,1	1 : 24,4	1 : 23,9	1 : 25,4	1 : 28,1	1 : 31,8
4	Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata	1 : 10,98	1 : 11,02	1 : 11,5	1 : 13,56	1 : 13,51	1 : 28,9

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman



Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah pendidikan dasar mengalami peningkatan setiap tahun dari 89,96 per 1.000 jumlah penduduk pada tahun 2012 menjadi 95,40 per 1.000 jumlah penduduk pada tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah murid sekolah dasar mengalami peningkatan per 1.000 jumlah penduduk Kabupaten Pasaman. Hal ini sesuai dengan harapan penyelenggaraan program wajib belajar 9 tahun oleh pemerintah. Sementara dari perbandingan guru terhadap murid dan murid per kelas rata-rata dari tahun 2012 sampai tahun 2017 tidak ada permasalahan yang berarti.

## 2) Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan sekolah untuk murid usia 16 – 19 tahun, yang diukur dengan indikator yang sama dengan pendidikan dasar yaitu angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah, dan rasio guru dengan murid serta rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 7  
Perkembangan Pendidikan Menengah di Kabupaten Pasaman Tahun 2012-2017

NO	Indikator	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Partisipasi Sekolah	78,67	78,71	78,83	79,02	79,11	79,32
2	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah	1 : 610,2	1 : 612,8	1 : 614,3	1 : 615,9	1 : 617,2	1 : 619,5
3	Rasio Guru Terhadap Murid	1 : 10,97	1 : 12,25	1 : 12,36	1 : 14,25	1 : 13,43	1 : 11,65
4	Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata	1 : 0,050	1 : 0,051	1 : 0,052	1 : 0,042	1 : 0,038	1 : 0,032

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman

Angka partisipasi sekolah pendidikan menengah juga cenderung mengalami peningkatan setiap tahun dari 78,67 per 1.000 jumlah penduduk pada tahun 2012 menjadi 79,32 per 1.000 jumlah penduduk pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah murid yang menempuh pendidikan menengah mengalami peningkatan per 1.000 jumlah penduduk pada setiap tahunnya.



Indikator lainnya yakni Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata, juga memperlihatkan peningkatan. Pada tahun 2017, menunjukkan bahwa 1 guru tingkat pendidikan dasar melayani sebanyak 11,65 murid atau dibulatkan menjadi 12 murid, artinya bahwa guru yang mengajar di kelas tidak kurang, justru kalau dikaji berdasarkan SPM Pendidikan, ketersediaan jumlah guru ini menunjukkan kondisi berlebih. Kondisi ini diduga terjadi karena pendistribusian guru di pendidikan menengah belum merata.

Penduduk berusia 15 tahun atau lebih yang melek huruf mengalami peningkatan pada kurun lima tahun terakhir. Berdasarkan data tahun 2012 angka melek huruf di Kabupaten Pasaman sebesar 85.70%, dan tahun 2017 meningkat menjadi 98,18%, artinya angka melek huruf meningkat sebesar sekitar 12% pada kurun waktu empat tahun terakhir.

#### **a. Kesehatan**

Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas tidak terlepas dari upaya peningkatan Pelayanan Kesehatan. Semua masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat dan cepat. Upaya pemerintah Kabupaten Pasaman dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan juga diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan pelayanan kesehatan dan kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat, seperti dalam penyediaan dan pelayanan posyandu, penyediaan tenaga dokter dan tenaga medis dan lain sebagainya.

#### **b. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kecamatan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah SKPD adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas kesehatan
6. Dinas Sosial



7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8. Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
12. Dinas Pertanian
13. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15. Dinas pemuda Olah Raga dan Pariwisata
16. Dinas Perhubungan
17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
20. Dinas Komunikasi dan Informatika
21. Dinas pemberdayaan Masyarakat
22. Dinas Pangan
23. Dinas Perikanan
24. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan sumber Daya Manusia
26. Badan Keuangan Daerah
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
29. RSUD Lubuksikaping

Sedangkan Kecamatan yang ada pada Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Tigo Nagari
2. Kecamatan Simpang alahan Mati
3. Kecamatan Bonjol
4. Kecamatan Lubuksikaping
5. Kecamatan Panti
6. Kecamatan Dua Koto
7. Kecamatan Padang Gelugur
8. Kecamatan Rao Selatan
9. Kecamatan Rao
10. Kecamatan Rao Utara



11. Kecamatan Mapat Tunggul
12. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan

### c. Aparatur Pemerintah

Pada tahun 2017, di Kabupaten Pasaman terdapat 4.647 Pegawai Negeri Sipil terdiri dari 1.901 Pria dan 2.746 Wanita. Salah satu indikator kemampuan dalam hal penyelesaian pelanggaran disiplin aparatur selama tahun 2017 telah mencapai 95%.

Untuk perincian jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 8**

**Jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman  
Berdasarkan Tingkat Golongan**

No	Golongan	Jumlah	Ket.
1	IV	1.435	
2	III	2.285	
3	II	910	
4	I	64	
	Jumlah	4.674	

*Sumber data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017*

- 2) Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselon dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 9**

**Jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman  
Berdasarkan Eselon**

No	Golongan	Jumlah	Ket.
1	II	35	
2	III	135	
3	IV	411	
	Jumlah	587	

*Sumber data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017*



- 3) Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 10**

**Jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Golongan	Jumlah	Ket.
1	S3	1	
2	S2	147	
3	S1	2.825	
4	DIII	558	
5	DII	225	
6	DI	46	
7	SMA	772	
8	SMP	66	
9	SD	41	
	Jumlah	4674	

*Sumber data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017*



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

#### 1. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Pasaman tahun 2016-2021 tidak lepas dari tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Pasaman 2005-2025. Visi yang hendak dicapai pada RPJPD Kabupaten Pasaman tahun 2005-2025 adalah "Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pasaman yang sejahtera lahir dan bathin Tahun 2025". Selanjutnya visi ini dijabarkan menjadi lima misi: Yakni, 1) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya; 2) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; 3) mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas; 4) mewujudkan pembangunan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan sesuai dengan kaedah-kaedah pelestarian lingkungan; dan 5) Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas berdasarkan prinsip pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan tantangan yang sedang dan akan dihadapi Kabupaten Pasaman sebagaimana yang dijabarkan pada bab IV, sejak mengajukan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati, Yusuf Lubis dan Atos Pratama, telah memilih arah pembangunan dengan menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021. Dengan memenangkan Pilkada tersebut, berarti bahwa masyarakat menyetujui dan mendukung arah pembangunan Kabupaten Pasaman tersebut. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan tersebut dipaparkan dibawah ini.

Visi Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 adalah :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PASAMAN YANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN BERBUDAYA".

Dari visi ini terlihat ada tiga tujuan yang hendak dicapai; yakni mengusahakan terwujudnya masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang



agamis dan masyarakat yang berbudaya. Pengertian dari ketiga tujuan ini adalah:

- MASYARAKAT YANG SEJAHTERA** : Suatu kondisi masyarakat Kabupaten Pasaman yang aman, makmur dan sentosa yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas hidup yang berdaya saing serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan
- MASYARAKAT YANG AGAMIS** : Suatu kondisi masyarakat Kabupaten Pasaman yang taat dalam melaksanakan ajaran agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang didukung oleh toleransi kehidupan beragama.
- MASYARAKAT YANG BERBUDAYA** : Suatu kondisi masyarakat Kabupaten Pasaman yang hidup dalam keharmonisan budaya dengan karakter dan kepribadian yang baik dan luhur berlandaskan kebudayaan dan kearifan lokal serta upaya pengembangan dan pelestarian warisan budaya daerah.

## 2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dari isu dan pencapaian visi Kabupaten Pasaman tersebut, maka dirumuskan 6 (enam) Misi Kabupaten Pasaman yaitu:

### a. **Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan serta Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama;**

Kualitas hidup masyarakat selain ditentukan oleh tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan kemampuan ekonomi juga tidak kalah pentingnya ditentukan oleh kualitas keimanan dan ketaqwaan serta pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat perlu dilakukan berbagai upaya untuk peningkatan keimanan dan pengamalan ajaran agama guna terciptanya suasana kehidupan yang



aman, damai serta bahagia melalui peningkatan pendidikan keagamaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah dan peningkatan kesejahteraan dan jumlah Da'i/Muballigh dan guru mengaji disetiap nagari dan Jorong.

**b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Sumber Daya Manusia, dan Penanggulangan Kemiskinan;**

Kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh Tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan kemampuan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasaman yang sejahtera, dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan perekonomian, peningkatan derajat keimanan dan ketaqwaan serta penanaman nilai-nilai luhur budaya daerah di tengah-tengah masyarakat. Semakin meningkatnya pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat, akan memberikan dampak terhadap semakin besarnya peluang untuk memperoleh kesejahteraan.

Pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat juga didukung oleh pembangunan sumber daya manusia terkait dengan peningkatan kualitas kependudukan dan keluarga berencana, kependudukan dan olahraga, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak serta pembangunan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.

**c. Meningkatkan Pendapatan dan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing dan Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam serta Pengembangan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan;**

Kabupaten Pasaman mempunyai potensi sumber daya alam yang besar, yang apabila dimanfaatkan secara optimal akan banyak memberi dampak atau manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai terobosan untuk dapat menggali dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang besar itu melalui berbagai upaya, antara lain dengan penataan ruang, mengusulkan perubahan status kawasan, pemanfaatan lahan tidur, memberikan kemudahan untuk berinvestasi dan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemanfaatan lahan yang mereka miliki.

**d. Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Penanganan Bencana yang Terpadu dan Berkualitas;**

Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan merupakan penunjang peningkatan pembangunan secara keseluruhan (sosial, ekonomi, budaya) di Kabupaten Pasaman. Kondisi ini dilakukan melalui pembangunan terminal dan kelayakan angkutan umum serta pemeliharaan infrastruktur yang telah ada.

Beberapa wilayah di Kabupaten Pasaman merupakan daerah rawan bencana, oleh sebab itu perlu penanggulangan bencana yang terpadu dan berkualitas, sehingga terwujud lingkungan hidup yang lestari.

**e. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Terpercaya;**

Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih merupakan prasyarat dalam mewujudkan aspirasi masyarakat, serta menjadi keharusan karena melalui pemerintahan yang baik dan bersih akan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam setiap gerak pembangunan.

Prinsip-prinsip utama dari Pemerintahan yang baik adalah Akuntabilitas, Transparansi, kepastian hukum, Profesionalitas, Partisipasi dan Desentralisasi.

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, diyakini akan dapat menciptakan suasana pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang kondusif dalam membangun daerah sehingga akan dapat mendorong peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat.



**f. Mengembangkan dan Melestarikan Nilai-nilai Budaya Daerah serta Membangun Karakter Masyarakat.**

Agar pembangunan daerah sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya daerah, maka perlu dilakukan upaya penggalan, pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah melalui pemberdayaan lembaga adat seperti LKAAM, KAN, serta pemberdayaan ninik mamak, bundo kanduang, dan tokoh-tokoh adat lainnya.

Mengingat masyarakat Kabupaten Pasaman yang majemuk, maka perlu didorong tumbuhnya Forum komunikasi antar budaya dan adat dalam rangka meningkatkan keharmonisan budaya untuk memperkokoh kesaiyoan masyarakat Kabupaten Pasaman.

**3. Tujuan**

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Maka berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan pembangunan Kabupaten Pasaman dalam periode 2016-2021 untuk setiap misi sebagai berikut:

**Misi 1: Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan serta Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama**

Tujuan:

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Meningkatkan kesalehan sosial dan penguatan kelembagaan Agama

**Misi 2: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Sumber Daya Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan**

Tujuan:

1. Meningkatkan Pelayanan dan Pemerataan Pendidikan Masyarakat
2. Meningkatkan Mutu Pendidikan Masyarakat
3. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat



4. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia
5. Mewujudkan Penurunan Kemiskinan Masyarakat

**Misi 3: Meningkatkan Pendapatan dan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya saing dan Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam serta Pengembangan Pariwisata yang berwawasan Lingkungan**

Tujuan:

1. Meningkatkan Pembangunan Pertanian, Perkebunan, dan peternakan Masyarakat
2. Meningkatkan Pengembangan Perikanan budidaya
3. Menciptakan Ketahanan Pangan Daerah
4. Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terbarukan
5. Menciptakan UMKM yang Produktif dan Berdaya Saing
6. Mengembangkan Kepariwisata

**Misi 4: Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Penanganan Bencana yang Terpadu dan Berkualitas**

Tujuan:

1. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur yang merata
2. Meningkatkan Pelayanan dan Akses Transportasi, Komunikasi dan Informasi
3. Mewujudkan Penanggulangan Bencana yang Terpadu dan Berkualitas
4. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Lestari

**Misi 5: Menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Terpercaya**

Tujuan:

1. Pelayanan Prima kepada Masyarakat
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
3. Meningkatkan Sinergitas antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat
4. Mewujudkan Pemerintah Nagari yang Kuat



## **Misi 6: Mengembangkan dan Melestarikan Nilai-nilai Budaya Daerah serta Membangun Karakter Masyarakat**

Tujuan:

1. Meningkatkan Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah

### **4. Sasaran**

Dari visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

#### **Misi 1: Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan serta Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama**

Sasaran:

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat;
2. Meningkatnya kerukunan hidup beragama
3. Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat
4. Meningkatnya peran lembaga/organisasi keagamaan dalam kehidupan masyarakat
5. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)

#### **Misi 2: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Sumber Daya Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan**

Sasaran:

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
2. Meningkatnya layanan pendidikan
3. Meningkatnya pemerataan pendidikan
4. Meningkatnya mutu pendidikan
5. Meningkatnya karakter dan integritas peserta didik
6. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca
7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat



8. Meningkatnya kualitas kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
9. Meningkatnya kegiatan olahraga masyarakat dan olahraga prestasi
10. Meningkatnya kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan
11. Meningkatnya pembangunan perspektif gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak
12. Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
13. Menurunnya tingkat kemiskinan dan PMKS
14. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

**Misi 3: Meningkatkan Pendapatan dan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya saing dan Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam serta Pengembangan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan**

Sasaran:

1. Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis
2. Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatnya Usaha Perikanan budidaya dengan Minabisnis
4. Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya dan Pengolah Perikanan budidaya
5. Terciptanya ketahanan Pangan dan keragaman konsumsi pangan
6. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam terbarukan
7. Meningkatnya pertumbuhan usaha yang berdaya saing
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha industri kecil menengah
9. Meningkatnya kunjungan wisatawan

**Misi 4: Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Penanganan Bencana yang Terpadu dan Berkualitas**



Sasaran:

1. Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas daerah
2. Meningkatnya akses kawasan perbatasan
3. Meningkatnya infrastruktur penunjang percepatan pembangunan perdesaan.
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan sumberdaya air dan irigasi
5. Meningkatnya Prasarana Umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, bangunan dan lingkungan
6. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang
7. Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi darat
8. Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi
9. Meningkatnya penanganan dan penanggulangan bencana yang terkoordinir, terpadu, dan efektif
10. Pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup

**Misi 5: Menyelenggarakan Pemerintahan yang baik, Bersih dan Terpercaya**

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya kinerja dan integritas aparatur
3. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik
4. Meningkatnya perencanaan yang Handal
5. Meningkatnya harmonisasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat dalam pembangunan
6. Terbentuknya Nagari mandiri

**Misi 6: Mengembangkan dan Melestarikan Nilai-nilai Budaya Daerah serta Membangun Karakter Masyarakat**

Sasaran:

1. Meningkatnya peran dan penguatan adat dan lembaga adat dalam tata kehidupan masyarakat



2. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat, seni dan budaya dalam masyarakat

Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel

**Tabel 11**  
**Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pasaman Yang Sejahtera, Agamis Dan Berbudaya</b>		
<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
<b>Misi 1:</b> Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan serta Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat; 2. Meningkatnya kerukunan hidup beragama
	2. Meningkatkan kesalehan sosial dan penguatan kelembagaan Agama	3. Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat 4. Meningkatnya peran lembaga/organisasi keagamaan dalam kehidupan masyarakat 5. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)
<b>Misi 2 :</b> Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Sumber Daya Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan	3. Meningkatkan Pelayanan dan Pemerataan Pendidikan Masyarakat	6. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat 7. Meningkatnya layanan pendidikan 8. Meningkatnya pemerataan pendidikan
	4. Meningkatkan Mutu Pendidikan Masyarakat	9. Meningkatkan mutu pendidikan 10. Meningkatnya karakter dan integritas peserta didik 11. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca
	5. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	12. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	6. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	13. Meningkatnya kualitas kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga 14. Meningkatnya kegiatan



		<p>olahraga masyarakat dan olahraga prestasi</p> <p>15. Meningkatnya kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan</p> <p>16. Meningkatnya pembangunan perspektif gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta</p> <p>17. Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan</p>
	7. Mewujudkan Penurunan Kemiskinan Masyarakat	<p>18. Menurunnya tingkat kemiskinan dan PMKS</p> <p>19. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka</p>
<p><b>Misi 3 :</b> Meningkatkan Pendapatan dan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya saing dan Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam serta Pengembangan Pariwisata yang berwawasan Lingkungan</p>	8. Meningkatkan Pembangunan Pertanian, Perkebunan, dan peternakan Masyarakat	<p>20. Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis</p> <p>21. Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat</p>
	9. Meningkatkan Pengembangan Perikanan budidaya	<p>22. Meningkatnya Usaha Perikanan budidaya dengan Minabisnis</p> <p>23. Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya dan Pengolah Perikanan budidaya</p>
	10. Menciptakan Ketahanan Pangan Daerah	24. Terciptanya ketahanan Pangan dan keragaman konsumsi pangan
	11. Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terbarukan	25. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam terbarukan
	12. Menciptakan UMKM yang Produktif dan Berdaya Saing	<p>26. Meningkatnya pertumbuhan usaha yang berdaya saing</p> <p>27. Meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha industri kecil menengah</p>
	13. Mengembangkan Kepariwisataaan	28. Meningkatnya kunjungan wisatawan



<p><b>Misi 4 :</b> Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Penanganan Bencana yang Terpadu dan Berkualitas</p>	<p>14. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur yang merata</p>	<p>29. Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas daerah 30. Meningkatnya akses kawasan perbatasan 31. Meningkatnya infrastruktur penunjang percepatan pembangunan perdesaan.  32. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan sumberdaya air dan irigasi 33. Meningkatnya Prasarana Umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, bangunan dan lingkungan 34. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang</p>
	<p>15. Meningkatkan Pelayanan dan Akses Transportasi, Komunikasi dan Informasi</p>	<p>35. Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi darat 36. Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi</p>
	<p>16. Mewujudkan Penanggulangan Bencana yang Terpadu dan Berkualitas</p>	<p>37. Meningkatnya penanganan dan penanggulangan bencana yang terkoordinir, terpadu, dan efektif</p>
	<p>17. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Lestari</p>	<p>38. Pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup</p>
	<p><b>Misi 5 :</b> Menyelenggarakan Pemerintahan yang baik, Bersih dan Terpercaya</p>	<p>18. Pelayanan Prima kepada Masyarakat</p>
	<p>19. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</p>	<p>40. Meningkatnya kinerja dan integritas aparatur 41. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik 42. Meningkatnya perencanaan yang Handal</p>
	<p>20. Meningkatkan Sinergitas antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat</p>	<p>43. Meningkatnya harmonisasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat dalam pembangunan</p>
	<p>21. Mewujudkan Pemerintah Nagari yang Kuat</p>	<p>44. Terbentuknya Nagari mandiri</p>



<p><b>Misi 6 :</b> Mengembangkan dan Melestarikan Nilai-nilai Budaya Daerah serta Membangun Karakter Masyarakat</p>	<p>21. Meningkatkan Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah</p>	<p>45. Meningkatkan peran dan penguatan adat dan lembaga adat dalam tata kehidupan masyarakat 46. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat, seni dan budaya dalam masyarakat</p>
---	--	---

Untuk mewujudkan dan melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut di atas, telah ditetapkan 12 (dua belas) agenda prioritas yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Hubungan antara misi dan agenda prioritas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 12**  
**Persandingan Misi dengan Agenda Prioritas**

MISI		AGENDA PRIORITAS	
1	Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan serta Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	1.	Agenda peningkatan keimanan dan ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Mahaesa
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Sumber Daya Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan	2. 3. 4.	Agenda Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan serta pengembangan Sumber Daya Manusia Agenda Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Agenda Penanggulangan Kemiskinan
3.	Meningkatkan Pendapatan dan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya saing dan Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam serta Pengembangan Pariwisata yang berwawasan Lingkungan	5. 6. 7.	Agenda Pembangunan Pertanian dan ketahanan Pangan Agenda Pengembangan ekonomi Kerakyatan Agenda pengembangan wisata religi dan budaya Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku rao serta Wisata Alam Kabupaten Pasaman
4.	Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Penanganan Bencana yang Terpadu dan Berkualitas	8. 9.	Agenda Pembangunan dan pemerataan infrastruktur Agenda penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan hidup
5.	Menyelenggarakan Pemerintahan yang baik, Bersih dan Terpercaya	10. 11.	Agenda reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik dan bersih Agenda penguatan pembangunan berbasis Nagari
6.	Mengembangkan dan Melestarikan Nilai-nilai Budaya Daerah serta Membangun Karakter Masyarakat	12.	Agenda pengembangan dan pelestarian kebudayaan dan pembangunan karakter masyarakat



## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2016-2021 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi

**Tabel 13**  
**Indikator Kinerja utama Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021**

	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>SKPD Penanggung Jawab</b>
	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Persentase SDM keagamaan berkompeten	Jumlah ulama berstandar/jumlah ulama seluruhnya x 100%	Bag. Kesra
2	Persentase sarana dan prasarana ibadah (manajemen mesjid)	Jumlah mesjid yang mempunyai fasilitas sholat/jumlah mesjid x 100%	Bag. Kesra
3	Persentase penyaluran ZIS melalui BAZNAS	Jumlah ZIS tersalurkan sesuai 8 musnaf/jumlah ZIS x 100%	Bag. Kesra
4	Angka rata-rata lama sekolah	Jumlah tahun sekolah/jumlah siswa x 100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Angka Partisipasi Sekolah APS Pendidikan Dasar APS Pendidikan Menengah	Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun yang masih sekolah/jumlah penduduk umur 16-18 tahun x 100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Angka Harapan Lama Sekolah	Jumlah siswa bersekolah/jumlah anak yang wajib sekolah x 100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Indek Integritas Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang melanggar aturan/jumlah peserta didik x 100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Persentase Kunjungan Perpustakaan	Jumlah pengunjung/kapasitas perpustakaan x 100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9	Angka Harapan Hidup	Jumlah umur yang meninggal/jumlah orang yang meninggal pada tahun itu	Dinas Kesehatan
10	Laju pertumbuhan penduduk	Jumlah kelahiran-jumlah kematian/ jumlah penduduk X 100%	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB



	Indikator Kinerja	Penjelasan	SKPD Penanggung Jawab
11	Unmetneed		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
12	Indek Developing Gender	Berdasarkan standar perhitungan umum	Dinas PPPA
13	Persentase Angka Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin/jumlah keluarga x 100%	Dinas Sosial
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran terbuka/jumlah angkatan kerja x 100%	Dinas Perdagangan, Perindustria dan Tenaga Kerja
15	Persentase peningkatan produksi pertanian	Jumlah peroduksi pertanian tahun ini –Jumlah produksi tahun lalu/jumlah produksi produksi pertanian tahun lalu X 100%	Dinas Pertanian
16	Nilai tukar petani	Jumlah pendapatan petani/kebutuhan petani X 100 %	Dinas Pertanian
17	Pertumbuhan produksi perikanan darat	Jumlah produksi perikanan budidaya/jumlah produksi pertanian X 100%	Dinas Perikanan
18	Nilai tukar budidaya	Jumlah pendapatan /jumlah kebutuhan budidaya X 100%	Dinas Perikanan
19	Persentase Angka Kerawanan Pangan	Jumlah kebutuhan pangan/jumlah produksi pangan X 100%	Dinas Pangan
20	Jumlah kunjungan ke destinasi wisata	Jumlah kunjungan wisata/kapasitas potensi wisata	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
21	Persentase peningkatan pembangunan panjang jalan	Jumlah jalan km yang dibangun/jumlah km jalan yang sudah dibangun X 100%	Dinas PU dan Tata Ruang
22	Persentase peningkatan kualitas jalan	Jumlah jalan yang layak/total panjang jalan X 100%	Dinas PU dan Tata Rua ng
23	Berkurangnya wilayah terisolir	Jumlah wilayah terisolir yang dibangun/jumlah wilayah terisolir X 100%	Dinas PU dan TR
24	Jumlah ketersediaan air yang termanfaatkan	Jumlah ketersediaan yang termanfaatkan/jumlah ketersediaan air X 100%	Dinas PU dan Tata Ruang, Bappeda
25	Pesentase Sumberdaya air yang terjaga	Jumlah sumber daya air/seluruh sumber daya air X 100%	Dinas PU dan Tata Ruang, Bappeda
26	Pesersentase cakupan pelayanan air minum	Jumlah kebutuhan air yang terlayani/Jumlah kebutuhan air minum X 100%	Dinas PUTR, BLH
27	Persentase rumah tangga bersanitasi	Jumlah rumah tangga bersanitasi/Jumlah rumah tangga X 100%	BLH
28	Persentase lingkungan kawasan kumuh	Jumlah kawasan kumuh yang tertata/Jumlah kawasan kumuh X100%	Dinas PUTR, BLH



	Indikator Kinerja	Penjelasan	SKPD Penanggung Jawab
28	Tingkat kepuasan masyarakat	Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Bagian Organisasi dan seluruh OPD
30	Pesertase investasi swasta	Jumlah investasi tahun ini- Jumlah Investasi Tahun Lalu/ jumlah investasi tahun lalu	BMPTSP
31	Persentase Penyelesaian pelanggaran disiplin aparatur	Jumlah aparatur yang terselesaikan/jumlah aparatur yang melanggar	BKPSDM
32	WTP Mandiri	Nilai Evaluasi Laporan Keuangan	Badan Keuangan Daerah
33	Persentase Ketepatan perencanaan	Jumlah perencanaan yang tepat sasaran/jumlah perencanaan	Bappeda
34	Tingkat nagari mandiri	Jumlah nagari mandiri/Jumlah Nagari	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat
35	Persentase Peran dan fungsi pemangku lembaga adat	Jumlah peran pemangku adat/jumlah pemangku adat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
36	Persentase warisan budaya yang dikelola	Warisan budaya yang dikelola/ Jumlah warisan budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang salah satu bahan evaluasi kinerja dan merupakan turunan dari Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Pasaman. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penting sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2016 berdasarkan APBD Tahun 2017.

**Tabel 14**  
**Perjanjian Kinerja Kabupaten Pasaman Tahun 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	1	Peningkatan SDM keagamaan berkompeten	45	%
		2	Manajemen sarana dan prasarana ibadah (manajemen mesjid)	0,4	%
2	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	3	Tingkat penyaluran ZIS melalui BAZNAS	38	%
3	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	4	Angka rata-rata lama sekolah	7,78	Tahun
4	Meningkatnya layanan pendidikan	5	Angka Partisipasi Sekolah		
			- APS Pendidikan Dasar	92,50	%
		- APS Pendidikan Menengah	81,01	%	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
5	Meningkatnya pemerataan pendidikan	6	Angka Harapan Lama Sekolah	12,71	Tahun
6	Meningkatnya karakter dan integritas peserta didik	7	Indek Integritas Peserta Didik	65,00	%
7	Meningkatnya minat baca dan budaya membaca	8	Tingkat Kunjungan Perpustakaan	24,42	%
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	9	Angka Harapan Hidup	66,67	Tahun
9	Meningkatnya kualitas kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	10	1.Laju pertumbuhan penduduk	1,19	%
		11	Unmetneed	12,62	%
10	Meningkatnya pembangunan perspektif gender	12	Indek Developing Gender	60,29	%
11	Menurunnya tingkat kemiskinan dan PMKS	13	Angka Kemiskinan	6,98	%
12	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	14	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,12	%
13	Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis	15	Peningkatan produksi pertanian	10,04	%
14	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	16	Nilai tukar petani	102	%
15	Meningkatnya Usaha Perikanan Budidaya dengan Minabisnis	17	Pertumbuhan produksi perikanan darat	30	%
16	Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya dan Pengolah Perikanan Darat	18	Nilai tukar budidaya	100,84	%
17	Terciptanya ketahanan Pangan dan keragaman konsumsi pangan	19	Penurunan Angka Kerawanan Pangan	8,44	%
18	Meningkatnya kunjungan wisatawan	20	Jumlah kunjungan	24.596	Orang
19	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas daerah dan kawasan perbatasan	21	Peningkatan panjang jalan	67	%
		22	Peningkatan kualitas jalan	54	%
		23	Pengurangan wilayah terisolir	8	%
20	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan sumberdaya air dan irigasi	24	Jumlah ketersediaan air yang dimanfaatkan	37	%
		25	Sumberdaya air yang terjaga	39	%
21	Meningkatnya Prasarana Umum pada kawasan pemukiman/ perumahan,	26	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum	78	%
		27	Meningkatnya rumah tangga bersanitasi	72,97	%
		28	Tertatanya lingkungan kawasan kumuh	5,82	%
22	Meningkatnya kualitas pelayanan public	29	Tingkat kepuasan masyarakat	36	%
		30	Peningkatan investasi swasta	25	%
23	Meningkatnya kinerja dan integritas aparatur	31	Penyelesaian pelanggaran disiplin aparatur	91,67	%
24	Meningkanya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik	32	WTP Mandiri	100	%
		33	Ketepatan perencanaan	84	%
25	Terbentuknya Nagari mandiri	34	Tingkat pertumbuhan nagari mandiri	7	%
26	Meningkatnya peran dan penguatan adat dan lembaga adat dalam tata kehidupan masyarakat	35	Peran dan fungsi pemangku lembaga adat	64	%
27	Meningkatkan Pemahaman, Pengembangan dan Pelestarian Nila – Nilai Kebudayaan Daerah	36	Persentase warisan budaya yang dikelola	67,5	%

Sedangkan program dan anggaran Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- |   |  |               |
|---|--|---------------|
| 1 | Program peningkatan keimanan dan ketaqwaan | 7.825.552.500 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis  | 5.948.039.050 |



3	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	61.149.218.400
4	Pembangunan prestasi di bidang olah raga	734.275.000
5	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	1.021.971.200
6	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	70.166.700
7	Program Keluarga Berencana	473.088.500
8	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	88.775.000
9	Program kerjasama informasi dengan mas media	2.693.755.050
10	Program Kerjasama Pembangunan	3.850.000
11	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	142.027.300
12	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	482.675.450
13	Program koordinasi pengendalian pembangunan	286.617.700
14	Program Lingkungan Sehat Perumahan	4.220.292.582
15	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.033.015.450
16	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	5.177.571.000
17	Program optimalisasi pelaksanaan pembangunan	622.698.900
18	Program optimalisasi pelaksanaan pemerintah daerah	755.445.800
19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	41.798.885.695
20	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	34.597.200
21	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	15.015.691.823
22	Program pelayanan kontrasepsi	2.216.357.500
23	Program Pemanfaatan Ruang	106.458.000
24	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	3.057.474.925
25	Program pembangunan jalan dan jembatan	19.868.305.514
26	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	78.809.000
27	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	503.662.500
28	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	3.483.113.500
29	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	405.747.350
30	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	827.000.000
31	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	903.819.000
32	Program pembinaan anak terlantar	80.676.000
33	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	1.438.140.500
34	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	2.872.036.460
35	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	230.143.300
36	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	169.892.200
37	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	349.190.000



38	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	425.065.500
39	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	263.240.900
40	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	22.000.000
41	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.380.366.500
42	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	110.860.000
43	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	191.177.800
44	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	221.967.000
45	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	912.806.300
46	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	965.545.000
47	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	382.125.000
48	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1.161.129.250
49	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	376.950.000
50	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.546.870.000
51	Program pendidikan kedinasan	1.312.474.000
52	Program Pendidikan Non Formal	258.980.900
53	Program pendidikan politik masyarakat	181.835.000
54	Program penelitian dan pengembangan perikanan	601.653.000
55	Program penelitian menunjang pemerintahan dan pembangunan	495.076.700
56	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	98.558.772.300
57	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	15.696.050.000
58	Program Pengawasan Obat dan Makanan	141.800.000
59	Program pengelolaan areal pemakaman	82.175.000
60	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	343.465.400
61	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	762.913.600
62	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	171.850.000
63	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	633.301.000
64	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	16.785.274.414
65	Program pengembangan data/informasi	205.825.000
66	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	340.794.100
67	Program pengembangan destinasi pariwisata	438.390.000
68	Program pengembangan industri kecil dan menengah	1.254.107.800
69	Program pengembangan investasi di bidang pertambangan dan energi	44.560.000



70	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	41.253.800
71	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	7.150.859.000
72	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	3.982.306.200
73	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.526.808.400
74	Program pengembangan lembaga ekonomi nagari	89.475.000
75	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	894.685.000
76	Program Pengembangan Nilai Budaya	389.630.000
77	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	84.750.000
78	Program pengembangan pemasaran pariwisata	978.990.000
79	Program Pengembangan Perumahan	172.200.000
80	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	85.579.000
81	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	778.914.000
82	Program pengembangan wawasan kebangsaan	183.815.000
83	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	8.081.463.590
84	Program Pengendalian Banjir	11.583.871.000
85	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1.674.377.900
86	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	106.100.000
87	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.104.804.050
88	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	7.500.000
89	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	58.163.250
90	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	603.557.700
91	Program peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan	479.415.500
92	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.810.840.000
93	Program peningkatan disiplin aparatur	2.303.850.000
94	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	404.375.000
95	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah nagari/desa	1.011.912.500
96	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	84.630.500
97	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	20.510.516.000
98	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	134.544.000
99	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	79.000.000
100	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	102.625.000
101	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	323.801.100
102	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	820.732.000
103	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.930.864.550
104	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Nagari	352.362.190



105	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	199.422.100
106	Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional	246.200.000
107	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.061.297.500
108	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	150.493.860
109	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	786.205.000
110	Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)	10.685.678.500
111	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	3.215.890.300
112	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	136.300.000
113	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	764.806.000
114	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	492.247.500
115	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	229.685.000
116	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	753.805.000
117	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun nagari	1.229.997.950
118	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	546.565.400
119	Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama	222.441.000
120	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	131.275.000
121	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	242.667.000
122	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	2.382.266.500
123	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	236.964.000
124	Program peningkatan pengendalian polusi	70.250.000
125	Program peningkatan peran perempuan di nagari	5.095.500
126	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	2.115.756.900
127	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1.095.201.000
128	Program peningkatan produksi hasil peternakan	1.637.112.500
129	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1.143.052.500
130	Program peningkatan produksi peternakan	86.650.000
131	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	178.250.000
132	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	277.834.450
133	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	17.507.504.549
134	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1.893.060.000
135	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1.866.750.000
136	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.277.145.500
137	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	21.900.000
138	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	66.080.000
139	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	226.495.000



140	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	670.870.000
141	Program perencanaan pembangunan daerah	3.494.689.300
142	Program perencanaan pembangunan ekonomi	123.927.500
143	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	235.495.000
144	Program perencanaan sosial dan budaya	249.489.050
145	Program Perencanaan Tata Ruang	157.200.000
146	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	43.633.500
147	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	91.466.000
148	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	119.286.400
149	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	237.500.000
150	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	45.064.000
151	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	43.650.453.445
152	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.090.929.850
153	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	35.429.035.795
154	Proram peningkatan kesiagaan bencana	219.656.800
	Jumlah	551.131.327.522



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 adalah perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya, dalam rangka mencapai misi pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kab. Pasaman Tahun 2017 dapat disajikan analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2017.

#### **A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017**

Indikator kinerja utama pada sasaran Pemerintah Kabupaten Pasaman didukung oleh indikator kinerja utama dari sasaran strategik yang difasilitasi oleh berbagai unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman. Sehingga dengan demikian pencapaian sasaran strategik Pemerintah Kabupaten Pasaman sangat dipengaruhi oleh dukungan kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh beberapa unit kerja untuk bersama-sama mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Pasaman

Keterkaitan atau hubungan antara setiap strategi dengan arah kebijakan sangat erat sekali dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu ditetapkan strategi dan setiap strategi dijabarkan kepada arah kebijakan. Setiap arah kebijakan nanti akan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan.

Secara umum, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman telah dapat melaksanakan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017. Dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan pada RPJM, umumnya telah berhasil mencapai kinerja pembangunan yang diharapkan, dimana indikator yang digunakan sebagai pengukuran capaian kinerja pada umumnya berdasarkan indikator outcome.



### a) Metode Perbandingan

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan analisis deskriptif dengan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### b) Misi 1 Meningkatkan Kualitas Keimanan Dan Ketaqwaan Serta Pemahaman Dan Pengamalan Ajaran Agama

Untuk mewujudkan misi tersebut, akan dicapai dengan dengan sasaran strategis yang akan dicapai sebagai berikut :

**(1) Sasaran strategis 1** : meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 15**

#### **Sasaran Statgis 1**

Urain	2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indikator Kinerja						
Persentase SDM keagamaan berkompeten	40 %	40 %	100 %	45 %	40 %	100%
Persentase sarana dan prasarana ibadah (manajemen mesjid)	0	0	0	0,4 %	0,3 %	75%
Rata-rata capaian	50%			87,5 %		



Dari tabel dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar untuk tahun 2017 adalah 100%, sedangkan pada tahun 2016 masih 50% dikarenakan oleh untuk indikator kedua belum ada target kinerjanya.

Peningkatan SDM keagamaan berkompeten dengan target tahun 2017 sebesar 40 %, yaitu dengan membandingkan antara jumlah ulama yang telah mengikuti pelatihan dengan jumlah ulama yang terdaftar di Pemerintah Kab. Pasaman tahun 2017

Indikator tersebut didapat dari jumlah ulama yang telah mengikuti pelatihan pada tahun 2017 dibandingkan dengan jumlah ulama yang ada dimana pada tahun 2017 ditargetkan 45 % dari jumlah ulama yang ada sudah mendapatkan pelatihan, yang mana pada tahun 2017 dari yang ditargetkan sebesar 45 % dapat direalisasikan.

Sebagai indikator kedua dari Sasaran strategis meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat adalah manajemen sarana dan prasarana ibadah (manajemen mesjid)

Pada tahun 2017 indikator kedua ditargetkan sebesar 0,4% terealisasi 0,3% karena tahun 2017 sudah ada satu mesjid pada tiap kecamatan telah adalah masa transisi, jadi untuk tahun 2017 direncanakan indikator ini ditarget sebesar 0,4% dari jumlah masjid yang ada di Kabupaten Pasaman, pada tahun 2017 terealisasi 1 Mesjid per kecamatan berjumlah 12 Mesjid

**(2) Sasaran strategis 2** : Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :



**Tabel 16**  
**Sasaran Strategis 2**

Indikator Kinerja	2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
indikator yaitu meningkatnya penyaluran ZIS melalui BAZNAS	35 %	20 %	57 %	38 %	30 %	78 %
Rata-rata capaian	57%			78%		

Dari tabel dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk tahun 2016 sebesar 57 %, sedangkan pada tahun 2017 terjadi kenaikan menjadi 78%, disebabkan karena peningkatan penerimaan dan penyaluran Zakat tahun 2017.

Target ini dihitung dengan membandingkan jumlah ZIS yang disalurkan melalui BASNAS dibandingkan dengan perkiraan zakat yang ada pada Kab. Pasaman sehingga pada tahun 2017 tercapai sebesar 78%

**c) Misi 2 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Sumber Daya Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan**

Untuk mewujudkan misi tersebut, ditempuh dengan dengan sasaran strategis yang akan dicapai sebagai berikut :

**(1) Sasaran strategis 3 : Meningkatnya** tingkat pendidikan masyarakat, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :



**Tabel 17**  
**Sasaran Strategis 3**

Uraian	2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
angka rata-rata lama sekolah	7,63 th	7,75 th	101,57 th	12,71 th	12,8 th	100,71%
Rata-rata capaian	101,57			100,71 %		

Dari tabel dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 3 sebesar pada tahun 2016 adalah 101,57 tahun dan untuk tahun 2017 sebesar 100,71%, sedikit terjadi penurunan.

Angka rata-rata lama sekolah merupakan perbandingan lama sekolah pendidikan umur 7 tahun sampai 18 tahun dibandingkan dengan jumlah siswa umur 7 tahun sampai 18 tahun. Adapun angka lama sekolah adalah 523.800 dan jumlah siswa umur 7 sampai dengan 18 tahun 67.600 orang.

Capaian indikator tersebut diperoleh dengan menerapkan strategi meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat melalui penyenggaraan wajib belajar 9 tahun Pendidikan Non Formal (PNF), Informal, Berkebutuhan Khusus dan Akademi Komunitas. Dengan kebijakan yang diambil adalah penyelenggaraan Wajib Belajar 12 tahun, peningkatan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF), Informal, Berkebutuhan Khusus dan Akademi Komunitas dan penyediaan bantuan untuk anak yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat mengikuti dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

**(2) Sasaran strategis 4** : meningkatnya layanan pendidikan, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :



**Tabel 18**  
**Sasaran Strategis 4**

Uraian	2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Angka Partisipasi Sekolah						
- APS Pendidikan Dasar	91,02%	93,00%	102,17%	92,50 %	95,44 %	103,18 %
- APS Pendidikan Menengah	79,31%	82,00%	103,39%			
Rata-rata capaian	102,78%			103,18%		

Dari tabel dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 4 pada tahun 2016 terdapat rata-rata capaian sebesar 102,78% sedangkan untuk tahun 2017 sebesar 103,18 %, untuk APS Pendidikan Menengah mulai tahun 2017 menjadi urusan Pemerintah Provinsi.

Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar, dengan target 92,50 % dan teralisasi 95,44 % untuk Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah mulai tahun 2017 menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, dengan komposisi adalah jumlah penduduk berumur 7-15 tahun yang masih sekolah berbanding dengan jumlah penduduk umur 7-15 tahun.

Adapun data APS pendidikan dasar adalah adalah jumlah penduduk berumur 7-15 tahun yang masih sekolah sebanyak 55.592 orang berbanding jumlah penduduk umur 7-15 tahun yaitu 58.720 orang. Sedangkan Capaian indikator kinerja diatas dilaksanakan melalui strategi meningkatkan layanan pendidikan melalui PAUD, Pendidikan Dasar dan partisipasi masyarakat serta dengan meningkatkan tata kelola pendidikan melalui pengelolaan data pendidikan dan kemitraan dengan tindakan kebijakan Peningkatan angka partisipasi PAUD dan Pendidikan Dasar, fasilitasi layanan pendidikan tingkat menengah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, peningkatan ketersediaan data berbasis teknologi informasi dan peningkatan kemitraan antara Pemerintah dengan Lembaga/Stakeholder Pendidikan.



**(3) Sasaran strategis 5** : meningkatnya pemerataan pendidikan, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 19**  
**Sasaran Strategis 5**

Uraian	2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Angka harapan lama sekolah	12,70 th	12,73 th	100,24%	12,71 th	12,80 th	100,71%
Rata-rata capaian	100,24			100,71%		

Dari tabel dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 5 pada tahun 2016 sebesar 100,24 % terjadi kenaikan pada tahun 2017 menjadi sebesar 100,71%

Pada tahun 2017 target yang dicanangkan untuk angka harapan lama sekolah adalah 12,71% dengan perhitungan adalah jumlah siswa bersekolah berbanding dengan jumlah anak yang wajib sekolah.

Angka harapan lama sekolah ini menggunakan rumus koreksi siswa pesantren. Dengan prediksi siswa pesantren sebesar 0,5%. Sehingga dari jumlah siswa sebesar 591.825 orang berbanding jumlah penduduk usia 7 tahun sampai dengan 18 tahun sebesar 75.802 orang.

Untuk mencapai indikator tersebut ditempuh melalui ketersediaan sarana prasarana, pemerataan guru dan tenaga kependidikan dengan kebijakan yang dilaksanakan adalah Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan pemerataan dan distribusi guru serta dengan peningkatan ketersediaan dan kesejahteraan pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (pengawas sekolah, kepala sekolah, pustakawan, laboran, tenaga administrasi sekolah)

**(4) Sasaran strategis 6** : meningkatnya karakter dan integritas peserta didik, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :



**Tabel 20**  
**Sasaran Strategis 6**

Uraian	2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indikator Kinerja						
Indek Integritas Peserta Didik	61,29%	81,20%	134,49	65,00 %	79,76 %	122,71
Rata-rata capaian	134,49%			122,71 %		

Dari tabel dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 6 untuk tahun 2016 sebesar 134,49% terjadi penurunan pada tahun 2017 menjadi 122,71% dengan rumusan yaitu Jumlah peserta didik yang melanggar aturan/jumlah peserta didik x 100 % Angka ini merupakan data dari Pusat Penelitian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Strategi yang ditempuh untuk hal ini adalah meningkatkan karakter dan integritas peserta didik dengan kebijakan yang ditempuh berupa peningkatan dan penguatan mutu pembelajaran yang berorientasi pada pendidikan karakter/budi pekerti yang terintegrasi, pengembangan budaya sekolah yang kondusif, berkarakter dan berintegritas.

**(5) Sasaran strategis 7 :** meningkatnya minat baca dan budaya membaca, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 21**  
**Sasaran Strategis 7**

Uraian	2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indikator Kinerja						
Persentase kunjungan perpustakaan	14,16%	12,55	88,63%	24,42 %	22,21 %	90,95 %
Rata-rata capaian	88,63%			90,95 %		



Dari tabel dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 7 pada tahun 2016 sebesar 88,63% sedangkan pada tahun 2017 sebesar 90,95%, terjadi kenaikan. dengan rumusan jumlah pengunjung dibagi dengan kapasitas perpustakaan dikali 100%

Pada tahun 2017 berdasarkan data yang dihimpun oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan bahwa jumlah kunjungan ke perpustakaan selama satu tahun adalah 25.333 orang dengan jumlah populasi yang harus dilayani (usia 10 s/d 59 tahun) berjumlah 187.527 orang. Berarti dalam sehari jika dirata-ratakan jumlah kunjungan ke perpustakaan sebanyak 80 orang dengan kapasitas perpustakaan sebesar 90 orang

Untuk mencapai indikator tersebut ditempuh dengan strategi meningkatkan minat baca dan budaya membaca melalui peningkatan kapasitas SDM, jangkauan dan ketersediaan sarana prasarana pendukung, hal ini dilakukan dengan langkah kebijakan yang diterapkan adalah peningkatan efektifitas dan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses, maupun utilitas, peningkatan kuantitas sarana dan prasana serta keberagaman koleksi perpustakaan (cetak/elektronik/digital) termasuk naskah kuno dan peningkatan jangkauan layanan perpustakaan serta peningkatan jumlah SDM pustakawan yang bersertifikasi

**(6) Sasaran strategis 8** : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator angka harapan hidup, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 22**

**Sasaran Strategis 8**

Urain	2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
angka harapan hidup	66,26 th	67,10		66,67 th	66,40 Th	99,59
Rata-rata capaian	101,2 %			99,59 %		



Dari tabel dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 8 sebesar 99,59%

Angka harapan hidup masyarakat Kab. Pasaman pada tahun 2016 diharapkan 66,40% jumlah umur yang meninggal pada tahun 2016 dibagi dengan jumlah yang meninggal pada tahun 2016 maka didapat hasilnya yaitu 66,40 tahun, artinya untuk tahun 2016 Angka Harapan Hidup Masyarakat Pasaman pada Tahun 2016 yaitu 66,40 tahun dengan tingkat capaian 99,59%, sedang data untuk tahun 2017 baru keluar pada April 2018.

**(7) Sasaran Strategis 9** : Meningkatnya kualitas kependudukan dan keluarga berencana, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 23**

**Sasaran Strategis 9**

Uraian	2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Laju pertumbuhan penduduk	1,23	1,23 %	100	1,19 %	1,20	99
Unmetneed	13,40%	17%	127	12,00 %	14,00 %	116
Rata-rata capaian	113,5%			107,5		

Dari tabel dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 9 pada tahun 2016 adalah sebesar 113,5% terjadi penurunan pada tahun 2017 menjadi sebesar 107,5% disebabkan oleh semakin meningkatnya PUS yang tidak mengikuti program KB

Laju pertumbuhan penduduk dihitung dengan jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian dibagi dengan jumlah penduduk ditargetkan pada tahun 2017, jumlah kelahiran 2017 sebesar 15.678, jumlah kematian 11.901 dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 315.470 orang.



Sedangkan indikator kedua dari sasaran strategis yang kesembilan adalah unmetneed, adalah jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak mengikuti KB baik menunda punya anak dan memang benar-benar tidak ingin punya anak. Merupakan program yang berkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja sasaran yang ada pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman yaitu persentase penurunan angka total fertility rate (TFR) atau rata-rata anak dalam keluarga. Untuk tahun 2017 target 3,2% dan realisasi 3,2% artinya capaian kinerja sasaran tercapai 100%. Program ini juga ditujukan untuk mewujudkan indikator sasaran lainnya yaitu persentase penurunan angka unmetneed. Tahun 2017 target 12% dan realisasi sebesar 14,86%, artinya untuk sasaran strategis penurunan persentase unmetneed hanya bisa dicapai 80,75% atau target belum target. Hal ini diperkirakan dapat disebabkan beberapa faktor yaitu :

- (a) Terjadinya kekosongan alat kontrasepsi IUD mulai dari bulan Januari s.d Mei 2017 di BKKBN Propinsi Sumatera Barat, sehingga dropping ke Kabupaten Pasaman tidak ada, akibatnya para akseptor yang ingin menggunakan alat kontrasepsi IUD tersebut tidak terlayani.
- (b) Secara umum dari 4 alat kontrasepsi jangka panjang (IUD, MOW, MOP dan IMPLANT) maka hanya MOP yang tidak mencapai target, sedangkan selebihnya melebihi target, namun proporsinya masih rendah, artinya masih dominan peserta KB di Kabupaten Pasaman itu yang memakai alat kontrasepsi jangka pendek, seperti suntik dan pil.
- (c) Karena didominasi oleh pemakai alat kontrasepsi jangka pendek, maka sering terjadi ketidak berlangsungan pemakaian alat kontrasepsi tersebut (tingginya angka DO / Drop Out).
- (d) Belum semua kantong-kantong daerah Unmetneed tergarap dengan baik.
- (e) Masih adanya Toma yang belum mendukung program KB ini, terutama di daerah-daerah Galciltas. Program ini terdiri dari 5 kegiatan yaitu : Pelayanan KIE, Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu, Pendataan Keluarga dan Orientasi Kader



Pelaksana Pendataan, Pembentukan Kampung KB dan Standarisasi Jaminan Pelayanan KB.

**(8) Sasaran strategis 10** : Meningkatnya pembangunan perspektif gender, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 24**  
**Sasaran Strategis 10**

Uraian	2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks developing gender	59,24%	10,9%	20,86	60,29 %	63,80 %	105
Rata-rata capaian	20,86			105		

Dari tabel dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 10 pada tahun 2016 20,6% sedangkan untuk tahun 2017 terjadi kenaikan yang signifikan yaitu menjadi 105%

Untuk menghitung indikator kinerja indek developing gender :

- jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pasaman Tahun 2017 sebanyak 3 orang dibandingkan dengan jumlah anggota pria sebanyak 35 orang maka IDP sebesar 9,3 %
- jumlah pejabat eselon II perempuan pada tahun 2017 sebanyak 3 orang dibandingkan dengan laki-laki 24 orang maka IDP nya 12,5 % , maka rata-rata IDP Kabupaten Pasaman Tahun 2016 10,9 %.

Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Kesetaraan gender sebagai kesamaan kondisi bagi laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi disegala bidang.

Sedangka IDG merupakan ukuran untuk menggambarkan persamaan peran antara perempuan dan laki-laki dalam aspek tersebut yaitu kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Indikator ini digunakan sebagai indikator perbandingan pencapaian kualitas hidup



laki-laki dan perempuan yang dapat melengkapi IPM pencapaian komponen IDG sebagai berikut:

1. Keterwakilan perempuan di parlemen ;
2. Tenaga Manager, profesional, administrasi dan teknisi; dan
3. Perkiraan penghasilan perempuan dan laki-laki.

Pada tahun 2016 realisasi IDG 59,79% terjadi kenaikan 60,29%, karena tingkat keterwakilan perempuan di parlemen dan tenaga manager terjadi kenaikan sebanyak 2 orang

**(9) Sasaran strategis 11** : Menurunnya tingkat kemiskinan dan PMKS, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 25**

**Sasaran Strategis 11**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Angka Kemiskinan ( <i>menurun</i> )	6,98 %	6,60 %	94,12 %
Rata-rata capaian			94,12 %

Dari tabel dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 11 sebesar 94,12%

Untuk menghitung indikator kinerja angka kemiskinan yaitu dengan membandingkan Jumlah Keluarga miskin dengan jumlah Keluarga di Kabupaten Pasaman Tahun 2017 dengan capaian 94,12% dengan total kepala keluarga 315.470 keluarga

**(10) Sasaran strategis 12** : Menurunnya Pengangguran Terbuka, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :



**Tabel 26**  
**Sasaran Strategis 12**

Uraian	2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tingkat Pengangguran Terbuka (menurun)	5,06%	4,06%	80,28	3,12 %	0,33 %	189 %
Rata-rata capaian	80,28%			189 %		

Dari tabel dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 12 pada tahun 2016 sebesar 80,28% sedangkan untuk tahun 2017 naik menjadi sebesar 189%, terjadi kenaikan yang signifikan disebabkan oleh kenaikan tenaga kerja yang mendapat pekerjaan. Tingkat pengangguran dihitung dengan membandingkan jumlah pencari kerja yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar x 100% pada tahun 2017 jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 659 orang dibagi dengan pencari kerja yang terdaftar sebanyak 1977 orang

Pengangguran terbuka disebabkan adanya pemutusan hubungan kerja, kurangnya pendidikan pencari kerja, lapangan kerja dan pengalaman pencari kerja.

**d) Misi 3 Meningkatkan Pendapatan dan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing dan Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Serta Pengembangan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan**

Untuk mewujudkan misi ini, disusunlah sasaran strategis yang akan dicapai sebagai berikut :

**(1) Sasaran Strategis 13** : Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :



**Tabel 27**  
**Sasaran Strategis 13**

Uraian	2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indikator Kinerja						
Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	6,40	-0,32	Minus 6,9	10,04 %	7 %	70%
Rata-rata capaian	Minus 6,9			70 %		

Dari tabel dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 13 pada tahun 2016 sebesar minus 0,32% sedangkan untuk tahun 2017 terjadi kenaikan menjadi sebesar 70% disebabkan oleh peningkatan jumlah produksi pertanian pada tahun 2017 sesuai tabel 28 dibawah ini.

Berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2020, target capaian indikator kinerja peningkatan produksi pertanian pada tahun 2017 adalah 10,04 %, sedang realisasinya adalah 7% dengan capaian kinerja 70 %. Produksi pertanian yang unggul di Kabupaten Pasaman didominasi oleh komoditas padi dan jagung pada bidang pertanian, karet dan kakao pada bidang perkebunan, karna keempat komoditas tersebut yang hasilnya produksinya paling banyak dan menjadi sumber PDRB terbesar pada urusan pertanian. Penjelasan dari masing-masing capaian indikator kinerja peningkatan produksi pertanian dari bidang pertanian dan perkebunan adalah sebagaimana berikut :

**Tabel 28**  
**Peningkatan Produksi Pertanian**

Produksi Pertanian (ton)	Tahun 2016	Tahun 2017	Peningkatan (%)
<b>I. Sektor Padi dan Palawija (ton)</b>			
a. Padi (ton)	188.060	200.090	
b. Jagung (ton)	77.638	90.762	
c. Ubi Kayu	1.987	2.687	
d. Ubi Jalar	1.208	1.508	
e. Kacang Tanah	329	500	
f. Kedele	8	10	
g. Kacang Hijau	45	50	



Jumlah	269.275	280.376	
<b>II. Sektor Perkebunan</b>			
a. Karet	34.080,85	40.089,45	
b. Kakao	14.670,38	17.090,65	
c. Kopi	4.556,84	4670,20	
d. Kelapa	8.090,38	10.090,2	
e. Kelapa Sawit	23.879,38	25.897,00	
f. Casiavera	19,25	20,31	
g. Nilam	12,14	16,15	
h. Enau	19,05	21,34	
i. Kemiri	52,92	66,70	
j. Pinang	1.459,32	1.670,06	
k. Gambir	20,50	24,90	
l. Gardamon	45,46	60,50	
m. Tembakau	6,00	7,00	
Jumlah	86.912,47	89.912,87	
Jumlah total	356.187,47	694.939	338.751 ton
Persentase Capaian Peningkatan Produksi pertanian	Minus 0,32 %	70%	70 %

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman Tahun 2016 dan 2017

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kabupaten Pasaman melalui Dinas Pertanian melaksanakan program peningkatan ketahanan pangan/produksi pertanian serta program peningkatan produksi pertanian/perkebunan melalui kegiatan revitalisasi perkebunan dan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan dengan menyerahkan bibit tanaman kepada kelompok dasawisma dan Kelompok Wanita Tani.

**(2) Sasaran Strategis 14** : Meningkatnya Kesejahteraan Petani, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 29**

**Sasaran Strategis 14**

Uraian	2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Tukar Petani	101%	99%	98,02	102 %	99,9 %	97,07 %
Rata-rata capaian	98,02			97,07 %		



Dari tabel dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 14 pada tahun 2016 sebesar 98,02% sedangkan pada tahun 2017 sebesar 96,07%, terdapat penurunan sebesar 1,02%

Dari tabel diatas dapat dilihat, indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan petani dengan target sebesar 102 % terealisasi sebesar 99,9 % dengan capaian sebesar 97,07 %, termasuk kategori penilaian keberhasilan sangat baik.

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan Indeks harga yang diterima petani (It) terhadap Indeks harga yang dibayar petani (Ib). Nilai Tukar Petani dijadikan sebagai indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di nagari. Nilai Tukar Petani juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Bila dibandingkan dengan nilai tukar petani pada tahun 2016, yaitu sebesar 99 %, maka terjadi penurunan nilai tukar petani., maka untuk mencapai target kinerja tahun 2018 dibutuhkan usaha yang lebih keras. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman akan lebih serius dalam meningkatkan subsektor-subsektor yang berperan dalam peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani, serta program-program yang mendukung pencapaiannya yakni program peningkatan kesejahteraan petani.

Realisasi dari program ini pada tahun 2016 diantaranya adalah terlaksananya pembinaan kepada kelompok tani untuk kesejahteraan petani sebanyak 12 kecamatan, terlaksananya pengawasan sistem penyaluran dan pendistribusian pupuk bersubsidi dan pestisida serta terlaksananya pelatihan dinamika kelompok/bimbingan teknis peningkatan mutu hasil pertanian serta serta pemberian bantuan bahan/bibit tanaman pertanian kepada kelompok tani.

**(3) Sasaran Strategis 15** : Meningkatnya Usaha Perikanan Budidaya dengan Minabisnis, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :



**Tabel 30**  
**Sasaran Strategis 15**

Uraian	2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Pertumbuhan produksi perikanan darat	20%	8,5%	42,5%	30 %	10 %	33,3 %
Rata-rata capaian	42,5%			33,3%		

Dari tabel dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 15 pada tahun 2016 42,5% terjadi penurunan menjadi sebesar 33,3%, penurunan ini disebabkan terlalu

Berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2020, target capaian indikator kinerja peningkatan produksi pertanian pada tahun 2017 adalah 30 %, sedang realisasinya adalah hanya 10% dengan capaian kinerja 33,3 %. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran strategis belum berhasil.

Tidak tercapainya target disebabkan disebabkan oleh para pembudidaya pada triwulan III tahun 2017 tidak ada yang melakukan usaha karena macetnya pemasaran ikan, sehingga ada sebagian pembudidaya harus panen sampai dengan waktu 9 bulan pemeliharaan.

**Tabel 31**  
**Produksi Ikan**

No	Produksi Ikan (Ton)	Tahun 2016	Tahun 2017
1	MAS	28.920,00	30.000
2	NILA	13.604,27	14.980,25
3	LELE	7.037,14	8.090,65
4	GURAMI	131,63	140.90
5	Lainnya	1.908,16	2345,79
	Jumlah	51.601,28	55,601,30

Solusi yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 untuk mencapai keberhasilan ini adalah menyediakan sarana dan prasarana



operasional berupa pengadaan pakan induk dan calon induk ikan, melakukan pengawasan dan monitoring hama dan penyakit ikan, melakukan pengembangan kawasan minapolitan, melaksanakan pelatihan pembuatan pakan ikan (Gerpari), pengembangan Wirausaha Perikanan melalui pengadaan benih ikan lele sebanyak 30.000 ekor, pakan sebanyak 2.100 Kg.

**(4) Sasaran Strategis 16** : yaitu meningkatnya Kesejahteraan Pembudidayaan dan Pengolah Perikanan Darat, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 32**  
**Sasaran Strategis 16**

Uraian	2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai tukar budidaya	100,05%	103,14%	103,09	100,84 %	100,88 %	100,04
Rata-rata capaian	103,09			100,04		

Dari tabel dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 16 pada tahun 2016 sebesar 103,09% sedangkan untuk tahun 2017 menjadi sebesar 100,04%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja pada tahun 2017 sasaran strategis tersebut adalah 100,04%, dari penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan capaian sasaran strategis untuk indikator nilai tukar budidaya masuk dalam kategori sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategi di atas dapat dicapai disebabkan oleh peranan dinas teknis terkait dalam peningkatan kesejahteraan pembudidaya melalui:

- Peningkatan produksi benih ikan unggul yang terdapat di 4 BBI yang berada di beberapa Kecamatan.



- Ketersediaan induk ikan unggul bagi UPR di kawasan minapolitan yang ada di 5 UPR.
- Pemberian bantuan benih ikan dan pakan ikan kepada masyarakat pembudidaya
- Pembinaan pembudidaya ikan melalui sosialisasi dan temu lapangan.
- Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan.

**(5) Sasaran Strategis 17** : Terciptanya ketahanan Pangan dan keragaman konsumsi pangan, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 33**  
**Sasaran Strategis 17**

Uraian	2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Angka Kerawanan Pangan ( <i>menurun</i> )	8,80%	8,80%	100	8,44 %	8,80 %	100 %
Rata-rata capaian	100%			100 %		

Dari tabel dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 17 sebesar 100% dan sama dengan tahun 2017 juga sebesar 100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut adalah 100%, nilai ini didapat berdasarkan hasil perhitungan Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat yang melakukan penghitungan Penurunan Angka Kerawanan Pangan se Sumatera Barat, dan untuk Kabupaten Pasaman Angka Kerawanan Pangannya berada pada angka 8,80% dan hal ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Kabupaten.



Dari penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan capaian sasaran strategis untuk indikator penurunan angka kerawanan pangan masuk dalam kategori sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis di atas dapat dicapai disebabkan oleh peranan dinas teknis terkait dalam Penurunan Angka kerawanan Pangan di Kabupaten Pasaman melalui:

- Pendataan potensi daerah rawan pangan
- Pemanfaatan pekarangan masyarakat untuk pengembangan pangan/ kawasan rumah pangan lesetari (KRPL) dan pembinaan kelompok wanita tani (KWT)
- Pembentukan tenaga koordinasi keamanan pangan segar
- Pemeliharaan dan penyaluran beras cadangan pangan pemerintah daerah
- Pembinaan kelompok lumbung pangan dan pengadaan cadangan pangan daerah dilokasi lumbung pangan
- Pembinaan dan pendampingan kelompok Desa Mandiri Pangan
- Pembangunan gudang sarana dan prasarana lumbung pangan masyarakat.

**(6) Sasaran Strategis 18** : Meningkatnya kunjungan wisatawan, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 34**

**Sasaran Strategis 18**

Uraian	2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Kunjungan Wisata	22.495 org	26.218 org	116,55	24.986 Org	27.438 Org	109,81
Rata-rata capaian	116,55 %			109,81 %		

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut pada tahun 2016 adalah 116,55% sedangkan pada tahun 2017 sebesar 109,81% terjadi penurunan dari



segi kinerja namun dari jumlah kunjungan wisata terjadi kenaikan dari tahun 2016.

Dari penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan capaian sasaran strategis untuk indikator Jumlah Kunjungan Wisata masuk dalam kategori sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis di atas dapat dicapai disebabkan oleh peranan dinas teknis terkait dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pasaman melalui:

- Promosi pariwisata melalui pelaksanaan Tour de Singkarak yang merupakan event Nasional di Provinsi Sumatera Barat dan pelaksanaan Titik Kulminasi yang dilaksanakan dua kali dalam satu tahun.
- Kegiatan event seni budaya dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Pemeliharaan objek wisata yang ada di Kabupaten Pasaman khususnya objek wisata Equator dan Musium Imam Bonjol dan kawasan wisata Rimbo Panti.

**e) Misi 4 Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Penanganan Bencana yang Terpadu dan Berkualitas**

Untuk mewujudkan misi tersebut, akan dicapai dengan dengan sasaran strategis yang akan dicapai sebagai berikut :

- (1) Sasaran strategis 19:** yaitu Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas daerah dan kawasan perbatasan, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :



**Tabel 35**  
**Sasaran Strategis 19**

Uraian	2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase peningkatan pembangunan panjang jalan	65%	41%	63,77	67 %	48 %	71,64
Persentase peningkatan kualitas jalan	50%	5,87%	51,42	54 %	40 %	74,07
persentase wilayah terisolir (menurun)	10%	3%	30%	8 %	5 %	62,5
Rata-rata capaian	48,40%			69,40 %		

Dari tabel dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 19 pada tahun 2016 sebesar 48,40% sedangkan untuk tahun 2017 terjadi kenaikan menjadi sebesar 69,40%

(a) Untuk dapat mengetahui indikator Peningkatan Panjang Jalan di Kabupaten Pasaman Tahun 2017 maka dapat dilakukan dengan membandingkan Jumlah keseluruhan Jalan yang telah dibangun dibagi Jalan Yang dibangun Oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2017.

Jumlah Keseluruhan Jalan di Kabupaten Pasaman = 1.063,68 Km.

Jumlah Jalan yang dibangun Tahun 2017 = 4,285 Km

Untuk Indikator Peningkatan Panjang jalan terdiri dari 35 Paket Pekerjaan fisik Pembangunan Jalan di Kabupaten Pasaman.

Dengan data diatas dapat diketahui bahwa realisasi peningkatan Panjang jalan sebesar 0,80%. Dengan demikian Capaian untuk indikator kinerja Peningkatan Panjang Jalan adalah 69,40%

Dalam rangka melaksanakan Indikator Kinerja Peningkatan Panjang jalan pada tahun 2017 di dukung dengan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan Pembangunan Jalan.



Kegiatan Pembangunan Jalan dilaksanakan terdiri dari 35 Paket pekerjaan sebagai berikut:

- (b) Peningkatan kualitas jalan yaitu dengan membandingkan Jumlah jalan yang layak/ Total panjang jalan yang telah dibangun .

Untuk dapat mengetahui indikator Peningkatan kualitas Jalan di Kabupaten Pasaman Tahun 2017 maka dapat dilakukan dengan membandingkan Jumlah jalan yang layak/ Total panjang jalan keseluruhan

Jumlah Jalan yang layak =484,5 Km

Jumlah Keseluruhan Jalan di Kabupaten Pasaman = 1.063,68 Km.

Untuk Indikator Kinerja Peningkatan kualitas jalan terdiri dari 29 paket pekerjaan

Dengan data diatas dapat diketahui bahwa realisasi peningkatan kualitas jalan sebesar 5,87%

Dengan demikian Capaian untuk indikator kinerja Peningkatan kualitas Jalan adalah 51, 42 %

Dalam rangka melaksanakan Indikator Kinerja Peningkatan kualitas jalan pada tahun 2016 di dukung dengan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan

Dengan kegiatan:

- (1) Kegiatan Pembangunan Jalan;
  - (2) Kegiatan Rehab/Pemeliharaan jalan;
  - (3) Kegiatan Pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur jalan
- (c) Untuk penunjang Indikator Kinerja terdiri dari 29 Paket pekerjaan yang terdiri dari:
- (1) 26 paket pekerjaan fisik rehab/pemeliharaan jalan terealisasi 100%;
  - (2) Pekerjaan fisik Rekonstruksi jalan paket I, pekerjaan dilanjutkan pada masa denda, melampaui tahun anggaran berjalan;
  - (3) Pekerjaan fisik Rekonstruksi jalan paket II putus kontrak;



(4) Pekerjaan Pengawasan tidak digunakan karena dengan besaran dana tersedia, konsultan tidak sanggup mengajukan penawaran.

(d) Pengurangan wilayah terisolir yaitu dengan membandingkan Jumlah wilayah terisolir yang dibangun/jumlah wilayah terisolir

Untuk dapat mengetahui indikator Pengurangan wilayah terisolir di Kabupaten Pasaman Tahun 2016 maka dapat dilakukan dengan membandingkan Jumlah wilayah terisolir yang dibangun/jumlah wilayah terisolir

Jumlah wilayah terisolir yang dibangun = 20 wilayah

Jumlah wilayah terisolir = 30 wilayah

Untuk Indikator Kinerja terdiri dar 10.paket

Dengan data diatas dapat diketahui bahwa realisasi Pengurangan wilayah terisolir sebesar 1 wilayah

Dengan demikian Capaian untuk indikator kinerja adalah Pengurangan wilayah terisolir 3 %

(2) **Sasaran strategis** 20 yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan sumberdaya air dan irigasi, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut

**Tabel 36**

**Sasaran Stategis 20**

Uraian	2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah ketersediaan air yang termanfaatkan	30%	12%	37	37 %	18 %	48 %
Persentase sumber daya air yang terjaga	30%	13%	39	39 %	23 %	58%
Rata-rata capaian	38%			53 %		



Dari tabel dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 20 adalah sebesar 38% untuk tahun 2017 terjadi kenaikan menjadi sebesar 53%

(a) Jumlah ketersediaan air yang termanfaatkan dengan target tahun 2017 sebesar 18 %, yaitu dengan membandingkan antara Jumlah ketersediaan air yang termanfaatkan dengan Jumlah ketersediaan air di Pemerintah Kab. Pasaman tahun 2017

Untuk mendapatkan indikator jumlah ketersediaan air yang termanfaatkan di Kabupaten Pasaman Tahun 2016 dilaksanakan paket pekerjaan yaitu :

(b) Sumber daya air yang terjaga yaitu dengan target tahun 2017 sebesar 23% yaitu dengan membandingkan antara Jumlah Sumberdaya air yang terjaga dan Seluruh sumber daya air di Pemerintah Kab.Pasaman Tahun 2017.

**(3) Sasaran strategis 21** yaitu meningkatnya Prasarana Umum pada kawasan pemukiman/perumahan bangunan dan lingkungan, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 37**

**Sasaran Stategis 21**

Uraian	2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase meningkatnya cakupan pelayanan air minum	72%	5,60%	77,60	78 %	67,0 %	85,89
Persentase rumah tangga bersanitasi	66,21%	6,76%	72,97	72,97 %	61,98 %	84,93
Persentase lingkungan kawasan kumuh ( <i>menurun</i> )	7,28%	1,46%	5,82	5,82 %	3,12 %	53,6
Rata-rata capaian	52,13%			74,8 %		

Dari tabel dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 21 sebesar 52,13% dan untuk tahun 2017 terjadi kenaikan menjadi sebesar 74,8%



- (a) Meningkatnya cakupan pelayanan air minum dengan target tahun 2017 sebesar 78 %, yaitu dengan membandingkan antara Jumlah kebutuhan air yang terlayani dengan Jumlah kebutuhan air minum di Pemerintah Kab. Pasaman tahun 2017

Untuk mencapai indikator meningkatnya cakupan pelayanan air minum dilaksanakan paket pekerjaan yaitu :

- (b) Meningkatnya rumah tangga bersanitasi dengan target tahun 2017 sebesar 53,6 % yaitu dengan membandingkan antara Jumlah rumah tangga bersanitasi/Jumlah rumah tangga di Pemerintah Kab. Pasaman tahun 2017

Untuk mencapai indikator Meningkatnya rumah tangga bersanitasi di Pemerintah Kab. Pasaman tahun 2016 dapat dicapai dengan melaksanakan :

- (c) Tertatanya lingkungan kawasan kumuh dengan target tahun 2017 sebesar 7,28 % yaitu dengan membandingkan antara Jumlah kawasan kumuh yang tertata dengan jumlah kawasan kumuh di Pemerintah Kab. Pasaman tahun 2016

Untuk mencapai indikator Tertatanya lingkungan kawasan kumuh dilaksanakan dengan program:

- Program pengembangan perumahan yaitu dengan melaksanakan 20 paket pekerjaan fisik penyediaan DAK Sanitasi terealisasi 81,82 % dan Sanitasi serta sosialisasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu terealisasi 95,58 %
- Program lingkungan sehat perumahan dengan melaksanakan kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin terealisasi 89,01 %

**f) Misi 5 Menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Terpercaya**

Untuk mewujudkan misi tersebut, akan dicapai dengan dengan sasaran strategis yang akan dicapai sebagai berikut :



- (1) **Sasaran Strategis 22** : Meningkatnya kualitas pelayanan publik, , dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 38**  
**Sasaran Strategis 22**

Uraian	2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tingkat kepuasan masyarakat	25%	20%	80	36 %	20 %	80
Persentase investasi swasta	10%	12%	120	25 %	12 %	120%
Rata-rata capaian	100%			100 %		

Dari tabel dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 22 sebesar 100% dan tahun 2017 juga sebesar 100%

Kepuasan masyarakat juga merupakan tolak ukur untuk menentukan kualitas pelayanan publik dihitung berdasarkan jumlah masyarakat yang dilakukan survey kepuasan dibanding jumlah masyarakat yang menerima layanan, dari dari indek kepuasan masyarakat yang dieproleh sebesar 76,43 dengan tingkat kepuasan masrakat yaitu baik, maka dari target 25 tahun 2017 tercapai 20

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Pasaman terbentuk tahun 2017 merupakan pengembangan dari Kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal. Pada tahun 2017 jumlah investor yang berencana menanamkan modalnya di Kabupaten Pasaman sebanyak 7 investor dengan nilai rencana sebesar Rp. 6.333.043.000.000,- ( Enam triliyun tiga ratus tiga puluh tiga milyar empat puluh tiga juta rupiah )tetapi yang terealisasi baru sebesar Rp. 3.799.452.552,- ( Tiga milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah ), hal ini mengalami penurunan dari tahun 2016 yang nilai realisasi investasi sebesar Rp. 14.150.000.000,-.realisasi ini hanya pada sector PMDN



sedangkan sector PMA belum ada investor asing yang menanamkan modalnya di Kabupaten Pasaman.

- (2) **Sasaran Strategis 23** : Meningkatnya kinerja dan integritas aparatur, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 39**  
**Sasaran Strategis 23**

Uraian	2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase penyelesaian penyelenggaraan disiplin aparatur	25%	20%	80	91,67 %	95 %	103,63
Rata-rata capaian	80%			103,63 %		

Dari tabel dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 23 pada tahun 2016 sebesar 80% sedangkan pada tahun 2017 terjadi kenaikan menjadi sebesar 103,63%.

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS merupakan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS baik ringan sedang maupun berat. Proses penanganan disiplin tahun 2017 yang masuk sebanyak 20 kasus dan sudah terselesaikan 19 kasus sudah mencapai 95%.

- (3) **Sasaran Strategis 24** : Meningkatnya pengelolaan keuangan yang baik, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :



**Tabel 40**  
**Sasaran Strategis 24**

Uraian	2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
WTP Mandiri	100%	100%	100	100 %	100 %	100 %
Ketepatan perencanaan	80%	80%	100	84 %	80 %	100 %
Rata-rata capaian	100			100 %		

Dari tabel dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 24 pada tahun 2016 sebesar 100% dan sama dengan tahun 2017 juga sebesar 100%

Dari hasil audit BPK Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Pasaman Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Pasaman sudah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun untuk tahun 2016, audit masih berlangsung.

Maksudnya dari 80% dari seluruh perencanaan yang dilaksanakan 80 persen diantaranya perencanaan tersebut tepat sasaran.

**(4) Sasaran Strategis 25** : terbentuknya nagari mandiri, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 41**  
**Sasaran Strategis 25**

Uraian	2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tingkat pertumbuhan nagari mandiri	0%	0%	0	7 %	0 %	-
Rata-rata capaian	0%					



Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), status kemajuan dan kemandirian Desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi Desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan Desa menjadi lebih maju dan mandiri. Cara klasifikasi tersebut tentu harus peka terhadap karakteristik Desa yang senyatanya sangat beragam, bukan hanya dari segi fisik geografis tetapi juga terkait nilai-nilai, budaya dan tingkat prakarsa masyarakat Desa.

Undang-Undang Desa memberi jalan bagi terwujudnya kehidupan masyarakat Desa yang maju, kuat, demokratis dan mandiri. Kewenangan Desa ditegaskan di dalam Undang-Undang Desa untuk memperkuat posisi Desa. Pelaksanaan kewenangan berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan dukungan pembiayaan dari Dana Desa dapat menjadi pendorong kuat bagi Desa untuk maju dan mandiri. Di sini, paradigmatik Desa Membangun diteguhkan dengan cara mewujudkan pernyataan Desa sebagai subyek pembangunan ke dalam praktek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penyebutan nama Indeks Desa Membangun ditujukan untuk memperkuat semangat ini.

Nagari Mandiri, atau bisa disebut sebagai Nagari Sembada adalah Nagari Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan

Berdasarkan Permendes Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) terdapat kategori Desa / Nagari sebagai berikut :

- (a) Desa/ Nagari Mandiri
- (b) Desa/ Nagari Maju
- (c) Desa/ Nagari Berkembang
- (d) Desa/ Nagari Tertinggal
- (e) Desa/ Nagari Sangat Tertinggal

Adapun Indikator Desa/Nagari Mandiri adalah sebagai berikut :



- (a) Masyarakat memiliki swadaya dan partisipasi yang tinggi dalam pembangunan
- (b) Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak dasar warganya
- (c) Memelihara kearifan lokal berupa norma adat dan kebiasaan yang berlaku
- (d) Memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat
- (e) Memiliki kemampuan dalam melindungi dan mengendalikan resiko dari konflik sosial dan ekonomi yang terjadi di lingkungannya

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi, dan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pasaman Tahun 2017 ditetapkan Tipologi Nagari dalam Kabupaten Pasaman dari 37 Nagari sebagai berikut :

- (a) Nagari Maju terdapat 4 Nagari yang terdiri dari :
  - 1. Nagari Durian Tinggi
  - 2. Nagari Padang Gelugur
  - 3. Nagari Panti
  - 4. Nagari Lansek Kodok
- (b) Nagari Berkembang terdapat 14 Nagari yang terdiri dari :
  - 1. Nagari Koto Kaciak
  - 2. Nagari Ganggo Hilia
  - 3. Nagari Ganggo Mudiak
  - 4. Nagari Tanjung Beringin
  - 5. Nagari Jambak
  - 6. Nagari Pauh
  - 7. Nagari Aia Manggih
  - 8. Nagari Sundata
  - 9. Nagari Cubadak
  - 10. Nagari Simpang Tonang
  - 11. Nagari Panti Selatan
  - 12. Nagari Bahagia
  - 13. Nagari Taruang-taruang
  - 14. Nagari Koto Rajo



(c) Nagari Tertinggal terdapat 16 Nagari yang terdiri dari :

1. Nagari Limo Koto
2. Nagari Binjai
3. Nagari Ladang Panjang
4. Nagari Alahan Mati
5. Nagari Simpang
6. Nagari Panti Timur
7. Nagari Sitombol
8. Nagari Sontang Cubadak
9. Nagari Padang Mentinggi
10. Nagari Lubuak Gadang
11. Nagari Pintu Padang
12. Nagari Muaro Tais
13. Nagari Silayang
14. Nagari Tanjung Betung
15. Nagari Lubuak Layang
16. Nagari Koto Nopan

(d) Nagari Sangat Tertinggal terdapat 3 Nagari yang terdiri dari :

1. Nagari Malampah
2. Nagari Muaro Sei Lolo
3. Nagari Languang

**(5) Sasaran Strategis 26** : yaitu meningkatnya peran dan penguatan adat dan lembaga adat dalam tata kehidupan masyarakat, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 42**

**Sasaran Strategis 26**

Uraian	2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Peran dan fungsi pemangku lembaga adat	60%	50%	83,33	64 %	68%	106,25 %
Rata-rata capaian	83,33%			106,25 %		



Dari tabel dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 26 sebesar pada tahun 2016 sebesar 83,33% sedangkan untuk tahun 2017 kenaikan signifikan menjadi 106,25%

Peran dan fungsi pemangku lembaga adat pada tahun 2017 terlihat pada:

- (a) Dalam kegiatan seni budaya kearifan lokal, peran serta dari pemangku adat sangat besar sekali.
- (b) Pada kegiatan workshop terhadap adat dan budaya, narasumber dan materinya ditangani langsung oleh pemangku adat, baik LKAAM maupun Bundo Kandung.
- (c) Dalam mengikuti festival dan lomba adat dan budaya di tingkat provinsi, bentuk-bentuk kegiatan selalu dikoordinasikan dengan pemangku adat (LKAAM dan Bundo Kandung).

Jumlah pemangku adat adalah sebagai berikut:

- LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau)
- Bundo Kanduang
- KAN (Kerapatan Adat Nagari)
- Ninik Mamak Nagari

Melihat fungsi dan peran dari pemangku adat disetiap kegiatan seni dan budaya dari tahun ke tahun selalu memperlihatkan peran yang sangat signifikan, sehingga eksistensi seni budaya tersebut dapat di apresiasi oleh masyarakat.

Melihat hal tersebut, untuk tahun 2017 peran tersebut bila dilihat dari persentasenya diperkirakan 106,25% dan untuk tahun berikutnya akan ditingkatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pemangku adat tersebut terutama dalam menunjang visi Pemerintah Daerah “sejahtera, agamis dan berbudaya.”



(6) **Sasaran Strategis 27** : yaitu meningkatnya pemahaman, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai kebudayaan daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 43**  
**Sasaran Strategis 27**

Uraian	2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase warisan budaya yang dikelola	62,5%	60%	96	67,5 %	76 %	112,59%
Rata-rata capaian	96%			112,59 %		

Dari tabel dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 27 sebesar 112,59%

Warisan budaya yang dikelola tahun 2017:

- (a) Candi Tanjung Medan Kec. Panti
- (b) Situs Dwarapala Kec. Rao Selatan
- (c) Prasasti Kubu Sutan Kec. Rao Selatan
- (d) Mariam Tuanku Imam Bonjol Kec. Bonjol
- (e) Prasasti Ganggo Hilia Kec. Bonjol

Dilihat dari peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan warisan budaya yang ada, ditargetkan untuk tahun 2016 sebanyak 62,5% karena tanggung jawab pengelolaannya juga terletak pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi.

## 1. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2017

Untuk perbandingan realisasi tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021, dengan uraian sebagai berikut :



**Tabel 44**  
**Perbandingan Rencana dan Realisasi Kinerja**  
**Tahun 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	1	Persentase SDM keagamaan berkompeten	45	45	100
		2	Persentase sarana dan prasarana ibadah (manajemen mesjid)	0,4	0,3	75
2	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	3	Persentase penyaluran ZIS melalui BAZNAS	38,00	30,00	78
3	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	4	Angka rata-rata lama sekolah	12,71	12,80	100,71
4	Meningkatnya layanan pendidikan	5	Angka Partisipasi Sekolah - APS Pendidikan Dasar	92,50	95,44	103,18
5	Meningkatnya pemerataan pendidikan	6	Angka Harapan Lama Sekolah	12,71	12,80	100,71
6	Meningkatnya karakter dan integritas peserta didik	7	Indek Integritas Peserta Didik	65,00	79,76	122,71
7	Meningkatnya minat baca dan budaya membaca	8	Persentase Kunjungan Perpustakaan	24,42	22,21	90,95
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	9	Angka Harapan Hidup	66,67	66,40	99,59
9	Meningkatnya kualitas kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	10	Laju pertumbuhan penduduk	1,19	1,20	99
		11	Unmetneed	12,00	14,00	116
10	Meningkatnya pembangunan perspektif gender	12	Indek Developing Gender	60,29	63,80	105
11	Menurunnya tingkat kemiskinan dan PMKS	13	Angka Kemiskinan ( <i>menurun</i> )	6,98	6,60	94,12
12	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	14	Tingkat Pengangguran Terbuka ( <i>menurun</i> )	3,12	0,33	10,57
13	Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis	15	Peningkatan produksi pertanian	10,04	7,00	70
14	Meningkatnya	16	Nilai tukar petani	102	99,9	97,07



No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Kesejahteraan Petani					
15	Meningkatnya Usaha Perikanan Budidaya dengan Minabisnis	17	Persentase pertumbuhan produksi perikanan darat	30	10	33,3
16	Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya dan Pengolah Perikanan Darat	18	Nilai tukar budidaya	100,84	100,88	100,04
17	Terciptanya ketahanan Pangan dan keragaman konsumsi pangan	19	Persentase angka kerawanan pangan ( <i>menurun</i> )	8,44	8,80	100,01
18	Meningkatnya kunjungan wisatawan	20	Jumlah kunjungan wisata	24.986	27.438	109,82
19	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas daerah dan kawasan perbatasan	21	Persentase peningkatan pemb. panjang jalan	67	48	71,64
		22	Persentase peningkatan kualitas jalan	54	40	74,07
		23	Persentase pengurangan wilayah terisolir	8	5	62,5
20	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan sumberdaya air dan irigasi	24	Jumlah ketersediaan air yang dimanfaatkan	37	18	48
		25	Persentase sumberdaya air yang terjaga	39	23	58
21	Meningkatnya Prasarana Umum pada kawasan pemukiman/ perumahan,	26	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum	78,00	67,00	85,89
		27	Meningkatnya rumah tangga bersanitasi	72,97	61,98	84,93
		28	Persentase tertatanya lingkungan kawasan kumuh	5,82	3,12	53,60
22	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	29	Tingkat kepuasan masyarakat	36	29	80
		30	Persentase investasi swasta	25	12	48
23	Meningkatnya kinerja dan integritas aparatur	31	Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin aparatur	91,66	95,00	103,63
24	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik	32	WTP Mandiri	100	100	100
		33	Ketepatan perencanaan	84	80	95,23



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
25	Terbentuknya Nagari mandiri	34	Tingkat pertumbuhan nagari mandiri	7	0	-
26	Meningkatnya peran dan penguatan adat dan lembaga adat dalam tata kehidupan masyarakat	35	Peran dan fungsi pemangku lembaga adat	64	68	106,25
27	Meningkatkan Pemahaman, Pengembangan dan Pelestarian Nilai – Nilai Kebudayaan Daerah	36	Persentase warisan budaya yang dikelola	67,5	76,00	112,95

## 2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasaman tahun 2017 telah di dukung dengan anggaran APBD Tahun 2017 sebesar Rp.1.034.854.195.416 terealisasi sebesar Rp. 956.230.834.701,19,- dari anggaran tersebut tersedia anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 551.131.327.522,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 435.481.074.423,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 45**  
**Akuntabilitas Keuangan**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
PENDAPATAN	1.034.854.195.416,00	956.230.834.701,78	92,40
PENDAPATAN ASLI DAERAH	135.311.751.279,00	100.292.256.278,78	74,12
Pendapatan Pajak Daerah	7.838.186.038,00	8.952.542.551,08	114,22
Hasil Retribusi Daerah	4.993.041.497,00	5.717.145.989,50	114,50
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.386.932.699,00	9.386.932.699,00	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	113.093.591.045,00	76.235.635.039,20	67,41
DANA PERIMBANGAN	814.927.016.000,00	767.064.865.457,00	94,13
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16.168.725.000,00	12.326.960.501,00	76,24
Dana Alokasi Umum	596.083.486.000,00	596.083.486.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	202.134.153.000,00	158.076.867.690,00	78,20
Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	540.652.000,00	577.551.266,00	106,82
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	84.615.428.137,00	88.873.712.966,00	105,03
Pendapatan Hibah	4.620.000.000,00	6.223.834.220,00	134,72



URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	35.594.617.137,00	38.449.067.746,00	108,02
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	43.450.811.000,00	43.450.811.000,00	100,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	950.000.000,00	750.000.000,00	78,95
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>561.670.691.773,68</b>	<b>521.220.834.292,00</b>	<b>92,80</b>
Belanja Pegawai	454.507.565.909,68	416.858.953.939,00	91,72
Belanja Hibah	6.661.200.000,00	6.646.200.000,00	99,77
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.058.595.964,00	989.013.778,00	93,43
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	98.093.329.900,00	96.726.666.575,00	98,61
Belanja Tidak Terduga	1.350.000.000,00	0,00	0,00
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>551.131.327.522,00</b>	<b>435.481.074.423,00</b>	<b>79,02</b>
Belanja Pegawai	26.367.363.000,00	15.574.195.750,00	59,07
Belanja Barang dan Jasa	294.624.437.315,00	244.146.194.330,00	82,87
Belanja Modal	230.139.527.207,00	175.760.684.343,00	76,37
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(77.947.823.879,68)</b>	<b>(471.074.013,22)</b>	<b>0,60</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>83.567.823.879,68</b>	<b>83.567.823.879,68</b>	<b>100,00</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	83.567.823.879,68	83.567.823.879,68	100,00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>5.620.000.000,00</b>	<b>5.593.000.000,00</b>	<b>99,52</b>
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.620.000.000,00	5.593.000.000,00	99,52
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>77.947.823.879,68</b>	<b>77.974.823.879,68</b>	<b>100,03</b>

### 3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Berikut dijelaskan analisis permasalahan dan solusi dari program dan kegiatan tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

**Tabel 46**  
**Permasalahan dan Solusi**

No	Permasalahan	Solusi
1	Masih kurangnya SDM yang terampil dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu dilaksanakan bimbingan teknis, pelatihan, diklat sesuai dengan teknis masing-masing</li> <li>- Penempatan aparatur sesuai dengan kompetensinya, pendidikan dan pengalaman kerja, serta prestasi kerja yang dimiliki</li> <li>- Perlu dilaksanakan konsultasi ke propinsi, pusat dan study banding ketempat daerah/ SKPD yang yang</li> </ul>



No	Permasalahan	Solusi
		berprestasi
2	Masih banyak SKPD yang kekurangan Pegawai	- Perlu diadakan penerimaan Pegawai untuk tahun yang akan datang
3	Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana alam	- Mengusulkan penambahan dana, peralatan dan logistik dll melalui APBD, APBD Propinsi, dan APBN
4	Masih ada SKPD yang membuat SOP tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	Perlu dilaksanakan bimbingan teknis terhadap SKPD baik diadakan berupa kegiatan maupun teknis khusus/ bimbingan khusus
5	Masih ada SKPD terkait yang menyampaikan SPM dan capaian SPM belum sesuai dengan aturan yang berlaku	Perlu dilaksanakan bimbingan teknis terhadap SKPD baik diadakan berupa kegiatan maupun teknis khusus/ bimbingan khusus

#### 4. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Masih kurangnya SDM yang terampil dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing SKPD dimana masih banyak SKPD yang kekurangan Pegawai sehingga perlu melakukan penambahan pegawai.

Sedangkan untuk peningkatan kualitas pegawai yang sudah ada perlu dilaksanakan bimbingan teknis, pelatihan, diklat sesuai dengan teknis masing-masing dan penempatan aparatur sesuai dengan kompetensinya, pendidikan dan pengalaman kerja, serta prestasi kerja yang dimiliki dan perlu dilaksanakan konsultasi ke propinsi, pusat dan study banding ketempat daerah/ SKPD yang yang berprestasi.

.

#### 5. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pada tahun 2016 terdiri dari 80 program untuk memenuhi maksud dari 27 sasaran strategis yang ada dalam RPJMD dengan tingkat capaian keberhasilan 71,86 %.



## B. REALISASI ANGGARAN

Untuk tahun 2017 sesuai dengan program yang dilaksanakan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 47**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2017**

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Capaian
1	Pembangunan prestasi di bidang olah raga	734.275.000	702.526.975	31.748.025	95,68
2	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	1.021.971.200	950.005.300	71.965.900	92,96
3	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	70.166.700	62.689.700	7.477.000	89,34
4	Program Keluarga Berencana	473.088.500	451.439.883	21.648.617	95,42
5	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	88.775.000	87.867.366	907.634	98,98
6	Program kerjasama informasi dengan mas media	2.693.755.050	2.490.665.000	203.090.050	92,46
7	Program Kerjasama Pembangunan	3.850.000	3.825.000	25.000	99,35
8	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	142.027.300	140.610.630	1.416.670	99,00
9	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	482.675.450	-	482.675.450	-
10	Program koordinasi pengendalian pembangunan	286.617.700	187.568.750	99.048.950	65,44
11	Program Lingkungan Sehat Perumahan	4.220.292.582	3.796.604.837	423.687.745	89,96
12	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.033.015.450	975.134.150	57.881.300	94,40
13	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	5.177.571.000	5.131.238.947	46.332.053	99,11
14	Program optimalisasi pelaksanaan pembangunan	622.698.900	560.882.889	61.816.011	90,07
15	Program optimalisasi pelaksanaan pemerintah daerah	755.445.800	650.627.156	104.818.644	86,12
16	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	41.798.885.695	38.604.251.008	2.888.313.539	92,36
17	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	34.597.200	26.708.600	7.888.600	77,20
18	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	15.015.691.823	13.020.589.233	1.995.102.590	86,71
19	Program pelayanan kontrasepsi	2.216.357.500	2.123.226.944	93.130.556	95,80
20	Program Pemanfaatan Ruang	106.458.000	87.883.957	18.574.043	82,55
21	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	3.057.474.925	1.450.231.394	1.607.243.531	47,43
22	Program pembangunan jalan dan jembatan	19.868.305.514	18.527.298.547	1.341.006.967	93,25
23	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	78.809.000	48.422.950	30.386.050	61,44
24	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	503.662.500	493.206.000	10.456.500	97,92



No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Capaian
25	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	3.483.113.500	-	3.483.113.500	-
26	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	405.747.350	355.814.750	49.932.600	87,69
27	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	827.000.000	807.663.650	19.336.350	97,66
28	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	903.819.000	741.393.200	162.425.800	82,03
29	Program pembinaan anak terlantar	80.676.000	68.117.500	12.558.500	84,43
30	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	1.438.140.500	1.259.748.550	178.391.950	87,60
31	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	2.872.036.460	2.397.472.376	474.564.084	83,48
32	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	230.143.300	191.728.500	38.414.800	83,31
33	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	169.892.200	139.215.450	30.676.750	81,94
34	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	349.190.000	348.213.300	976.700	99,72
35	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	425.065.500	-	425.065.500	-
36	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	263.240.900	241.395.275	21.845.625	91,70
37	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	22.000.000	22.000.000	-	100,00
38	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.380.366.500	2.162.371.795	217.994.705	90,84
39	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	110.860.000	99.143.900	11.716.100	89,43
40	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	191.177.800	-	191.177.800	-
41	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	221.967.000	-	221.967.000	-
42	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	912.806.300	788.269.880	124.536.420	86,36
43	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	965.545.000	-	965.545.000	-
44	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	382.125.000	346.872.150	35.252.850	90,77
45	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1.161.129.250	1.036.945.383	124.183.867	89,30
46	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	376.950.000	324.710.292	52.239.708	86,14
47	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.546.870.000	1.503.286.250	43.583.750	97,18
48	Program pendidikan kedinasan	1.312.474.000	1.222.802.250	89.671.750	93,17
49	Program Pendidikan Non Formal	258.980.900	222.479.550	36.501.350	85,91
50	Program pendidikan politik masyarakat	181.835.000	90.244.417	91.590.583	49,63



No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Capaian
51	Program penelitian dan pengembangan perikanan	601.653.000	568.382.154	33.270.846	94,47
52	Program penelitian menunjang pemerintahan dan pembangunan	495.076.700	381.453.300	113.623.400	77,05
53	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	98.558.772.300	-	98.558.772.300	-
54	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	15.696.050.000	-	15.696.050.000	-
55	Program Pengawasan Obat dan Makanan	141.800.000	135.089.750	6.710.250	95,27
56	Program pengelolaan areal pemakaman	82.175.000	76.749.750	5.425.250	93,40
57	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	343.465.400	331.990.750	11.474.650	96,66
58	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	762.913.600	597.652.500	165.261.100	78,34
59	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	171.850.000	148.718.350	23.131.650	86,54
60	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	633.301.000	584.816.050	48.484.950	92,34
61	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	16.785.274.414	-	16.785.274.414	-
62	Program pengembangan data/informasi	205.825.000	159.019.650	46.805.350	77,26
63	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	340.794.100	288.300.973	52.493.127	84,60
64	Program pengembangan destinasi pariwisata	438.390.000	431.737.500	6.652.500	98,48
65	Program pengembangan industri kecil dan menengah	1.254.107.800	1.037.461.217	216.646.583	82,73
66	Program pengembangan investasi di bidang pertambangan dan energi	44.560.000	43.109.500	1.450.500	96,74
67	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	41.253.800	-	41.253.800	-
68	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	7.150.859.000	6.998.268.000	152.591.000	97,87
69	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	3.982.306.200	3.908.600.150	73.706.050	98,15
70	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.526.808.400	1.377.014.595	149.793.805	90,19
71	Program pengembangan lembaga ekonomi nagari	89.475.000	88.322.250	1.152.750	98,71
72	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	894.685.000	851.434.062	43.250.938	95,17
73	Program Pengembangan Nilai Budaya	389.630.000	351.641.500	37.988.500	90,25
74	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	84.750.000	76.035.250	8.714.750	89,72
75	Program pengembangan pemasaran pariwisata	978.990.000	921.194.097	57.795.903	94,10
76	Program Pengembangan Perumahan	172.200.000	126.779.000	45.421.000	73,62



No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Capaian
77	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	85.579.000	59.791.100	25.787.900	69,87
78	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	778.914.000	-	778.914.000	-
79	Program pengembangan wawasan kebangsaan	183.815.000	169.881.146	13.933.854	92,42
80	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	8.081.463.590	7.628.202.089	453.261.501	94,39
81	Program Pengendalian Banjir	11.583.871.000	11.537.138.185	46.732.815	99,60
82	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1.674.377.900	1.488.446.750	185.931.150	88,90
83	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	106.100.000	49.153.743	56.946.257	46,33
84	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.104.804.050	1.015.551.600	89.252.450	91,92
85	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	7.500.000	7.190.000	310.000	95,87
86	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	58.163.250	10.014.900	48.148.350	17,22
87	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	603.557.700	552.215.000	51.342.700	91,49
88	Program peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan	479.415.500	424.005.150	55.410.350	88,44
89	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.810.840.000	-	4.810.840.000	-
90	Program peningkatan disiplin aparatur	2.303.850.000	1.439.813.400	864.036.600	62,50
91	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	404.375.000	259.175.050	145.199.950	64,09
92	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah nagari/desa	1.011.912.500	675.849.499	336.063.001	66,79
93	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	84.630.500	49.998.350	34.632.150	59,08
94	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	20.510.516.000	19.216.934.492	1.293.581.508	93,69
95	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	134.544.000	126.694.250	7.849.750	94,17
96	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	79.000.000	41.359.000	37.641.000	52,35
97	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	102.625.000	94.044.977	8.580.023	91,64
98	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	323.801.100	220.985.000	102.816.100	68,25
99		639.970.100	483.083.227	156.886.873	75,49
100	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	820.732.000	786.832.550	33.899.450	95,87
101	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.930.864.550	1.922.910.250	7.954.300	99,59
102		2.751.596.550	2.709.742.800	41.853.750	98,48
103	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Nagari	352.362.190	330.496.525	21.865.665	93,79
104	Program peningkatan keimanan dan ketaqwaan	7.825.552.500	7.223.648.500	601.904.000	92,31
105	Program Peningkatan				



No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Capaian
	Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	199.422.100	175.193.000	24.229.100	87,85
106	Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional	246.200.000	219.821.615	26.378.385	89,29
107	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.061.297.500	918.205.712	143.091.788	86,52
108	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	150.493.860	133.913.550	16.580.310	88,98
109	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	786.205.000	752.290.900	33.914.100	95,69
110	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	10.685.678.500	10.432.709.058	252.969.442	97,63
111	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	3.215.890.300	3.031.168.666	184.721.634	94,26
112	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	136.300.000	-	136.300.000	-
113	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	764.806.000	582.519.400	182.286.600	76,17
114	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	492.247.500	392.793.850	99.453.650	79,80
115	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	229.685.000	212.633.650	17.051.350	92,58
116	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	753.805.000	618.333.550	135.471.450	82,03
117	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun nagari	1.229.997.950	1.082.346.239	147.651.711	88,00
118	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	546.565.400	-	546.565.400	-
119	Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama	222.441.000	213.681.500	8.759.500	96,06
120	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	131.275.000	128.981.100	2.293.900	98,25
121	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	242.667.000	233.731.500	8.935.500	96,32
122	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	2.382.266.500	2.226.919.156	155.347.344	93,48
123	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	236.964.000	-	236.964.000	-
124	Program peningkatan pengendalian polusi	70.250.000	59.751.750	10.498.250	85,06
125	Program peningkatan peran perempuan di nagari	5.095.500	4.692.750	402.750	92,10
126	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	2.115.756.900	2.046.063.108	69.693.792	96,71
127	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1.095.201.000	995.817.150	99.383.850	90,93
128	Program peningkatan produksi hasil peternakan	1.637.112.500	1.498.571.826	138.540.674	91,54
129	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1.143.052.500	1.085.701.100	57.351.400	94,98
130	Program peningkatan produksi peternakan	86.650.000	72.549.100	14.100.900	83,73
131	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur	178.250.000	-	178.250.000	-



No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Capaian
	pengawasan				
132	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	277.834.450	260.949.582	16.884.868	93,92
133	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	17.507.504.549	16.927.834.418	579.670.131	96,69
134	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1.893.060.000	1.365.718.500	527.341.500	72,14
135	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1.866.750.000	1.683.597.500	183.152.500	90,19
136	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.277.145.500	-	1.277.145.500	-
137	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	21.900.000	-	21.900.000	-
138	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	66.080.000	62.489.500	3.590.500	94,57
139	Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis	5.948.039.050	5.884.667.750	63.371.300	98,93
140	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	226.495.000	88.772.160	137.722.840	39,19
141	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	670.870.000	624.107.750	46.762.250	93,03
142	Program perencanaan pembangunan daerah	3.494.689.300	2.664.185.319	830.503.981	76,24
143	Program perencanaan pembangunan ekonomi	123.927.500	95.958.150	27.969.350	77,43
144	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	235.495.000	175.540.000	59.955.000	74,54
145	Program perencanaan sosial dan budaya	249.489.050	192.448.416	57.040.634	77,14
146	Program Perencanaan Tata Ruang	157.200.000	29.871.150	127.328.850	19,00
147	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	43.633.500	28.055.000	15.578.500	64,30
148	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	91.466.000	-	91.466.000	-
149	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	119.286.400	44.217.150	75.069.250	37,07
150	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	237.500.000	233.477.000	4.023.000	98,31
151	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	45.064.000	43.470.000	1.594.000	96,46
152	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	43.650.453.445	36.397.202.658	7.253.250.787	83,38
153	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.090.929.850	952.035.526	138.894.324	87,27
154	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	35.429.035.795	30.217.200.758	5.211.835.037	85,29
155	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	61.149.218.400	17.955.358.394	43.193.860.006	29,36
156	Proram peningkatan kesiagaan bencana	219.656.800	158.729.300	60.927.500	72,26
	Jumlah	551.131.327.522	435.481.074.423	115.650.253.099	79,02



Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tahun 2017 sebesar 79,02 % yang terdiri dari 156 program jumlah anggaran sebesar Rp551.131.327.522 terealisasi sebesar 435.481.074.423 yang menunjang pembangunan Kabupaten Pada Tahun 2017.



## BAB IV

### PENUTUP

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati Pasaman telah dapat diselenggarakan dengan baik, Laporan Kinerja tahun 2017 ini adalah Laporan untuk tahun pertama dari periode RPJMD 2016-2021.

pencapaian kinerja yang lebih baik disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- a. Komitmen yang kuat dari Kepala Daerah dan Unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk memfokuskan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran stratejik yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 Kabupaten Pasaman
- b. Timbulnya kesadaran dari segenap aparat dan pimpinan Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk mengimplementasikan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 seiring dengan makin meningkatnya tekanan masyarakat untuk mewujudkan Good Governance.

Dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman ini menyajikan berbagai keberhasilan yang telah dicapai. Keberhasilan tentunya bukan hanya keberhasilan dari pemerintah Kabupaten Pasaman semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan, dukungan dunia usaha, partisipasi masyarakat serta civil society secara umum, dari 27 sasaran pembangunan yang telah direncanakan pada tahun 2016, secara umum telah dilaksanakan semuanya dalam bentuk program dan kegiatan.

Adapun capaian kinerja masing masing sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 48**  
**Capaian Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	1	Persentase SDM keagamaan berkompeten	45	45	100
		2	Persentase sarana dan prasarana ibadah (manajemen mesjid)	0,4	0,3	75



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	3	Persentase penyaluran ZIS melalui BAZNAS	38,00	30,00	78
3	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	4	Angka rata-rata lama sekolah	12,71	12,80	100,71
4	Meningkatnya layanan pendidikan	5	Angka Partisipasi Sekolah - APS Pendidikan Dasar	92,50	95,44	103,18
5	Meningkatnya pemerataan pendidikan	6	Angka Harapan Lama Sekolah	12,71	12,80	100,71
6	Meningkatnya karakter dan integritas peserta didik	7	Indek Integritas Peserta Didik	65,00	79,76	122,71
7	Meningkatnya minat baca dan budaya membaca	8	Persentase Kunjungan Perpustakaan	24,42	22,21	90,95
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	9	Angka Harapan Hidup	66,67	66,40	99,59
9	Meningkatnya kualitas kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	10	Laju pertumbuhan penduduk	1,19	1,20	99
		11	Unmetneed	12,00	14,00	116
10	Meningkatnya pembangunan perspektif gender	12	Indek Developing Gender	60,29	63,80	105
11	Menurunnya tingkat kemiskinan dan PMKS	13	Angka Kemiskinan ( <i>menurun</i> )	6,98	6,60	94,12
12	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	14	Tingkat Pengangguran Terbuka ( <i>menurun</i> )	3,12	0,33	10,57
13	Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis	15	Peningkatan produksi pertanian	10,04	7,00	70
14	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	16	Nilai tukar petani	102	99,9	97,07
15	Meningkatnya Usaha Perikanan Budidaya dengan Minabisnis	17	Persentase pertumbuhan produksi perikanan darat	30	10	33,3
16	Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya dan Pengolah Perikanan Darat	18	Nilai tukar budidaya	100,84	100,88	100,04
17	Terciptanya ketahanan Pangan dan keragaman konsumsi pangan	19	Persentase angka kerawanan pangan ( <i>menurun</i> )	8,44	8,80	100,01
18	Meningkatnya kunjungan wisatawan	20	Jumlah kunjungan wisata	24.986	27.438	109,82



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
19	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas daerah dan kawasan perbatasan	21	Persentase peningkatan pemb. panjang jalan	67	48	71,64
		22	Persentase peningkatan kualitas jalan	54	40	74,07
		23	Persentase pengurangan wilayah terisolir	8	5	62,5
20	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan sumberdaya air dan irigasi	24	Jumlah ketersediaan air yang dimanfaatkan	37	18	48
		25	Persentase sumberdaya air yang terjaga	39	23	58
21	Meningkatnya Prasarana Umum pada kawasan pemukiman/ perumahan,	26	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum	78,00	67,00	85,89
		27	Meningkatnya rumah tangga bersanitasi	72,97	61,98	84,93
		28	Persentase tertatanya lingkungan kawasan kumuh	5,82	3,12	53,60
22	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	29	Tingkat kepuasan masyarakat	36	29	80
		30	Persentase investasi swasta	25	12	48
23	Meningkatnya kinerja dan integritas aparatur	31	Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin aparatur	91,66	95,00	103,63
24	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik	32	WTP Mandiri	100	100	100
		33	Ketepatan perencanaan	84	80	95,23
25	Terbentuknya Nagari mandiri	34	Tingkat pertumbuhan nagari mandiri	7	0	-
26	Meningkatnya peran dan penguatan adat dan lembaga adat dalam tata kehidupan masyarakat	35	Peran dan fungsi pemangku lembaga adat	64	68	106,25
27	Meningkatkan Pemahaman, Pengembangan dan Pelestarian Nila – Nilai Kebudayaan Daerah	36	Persentase warisan budaya yang dikelola	67,5	76,00	112,95



**Tabel 49**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**  
**Tahun 2016 dan Tahun 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Realisasi 2016	Realisasi 2017
1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	1	Persentase SDM keagamaan berkompeten	40	45
		2	Persentase sarana dan prasarana ibadah (manajemen mesjid)	0	0,3
2	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	3	Persentase penyaluran ZIS melalui BAZNAS	20,00	30,00
3	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	4	Angka rata-rata lama sekolah	7,75	12,80
4	Meningkatnya layanan pendidikan	5	Angka Partisipasi Sekolah - APS Pendidikan Dasar	93,00	95,44
5	Meningkatnya pemerataan pendidikan	6	Angka Harapan Lama Sekolah	12,73	12,80
6	Meningkatnya karakter dan integritas peserta didik	7	Indek Integritas Peserta Didik	81,20	79,76
7	Meningkatnya minat baca dan budaya membaca	8	Persentase Kunjungan Perpustakaan	12,55	22,21
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	9	Angka Harapan Hidup	67,10	66,40
9	Meningkatnya kualitas kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	10	Laju pertumbuhan penduduk	1,23	1,20
		11	Unmetneed	17,00	14,00
10	Meningkatnya pembangunan perspektif gender	12	Indek Developing Gender	0,09	63,80
11	Menurunnya tingkat kemiskinan dan PMKS	13	Angka Kemiskinan ( <i>menurun</i> )		6,60
12	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	14	Tingkat Pengangguran Terbuka ( <i>menurun</i> )		0,33
13	Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis	15	Peningkatan produksi pertanian	-0,32	7,00
14	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	16	Nilai tukar petani	99,00	99,9
15	Meningkatnya Usaha Perikanan Budidaya dengan Minabisnis	17	Persentase pertumbuhan produksi perikanan darat	8,5	10



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Realisasi 2016	Realisasi 2017
16	Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya dan Pengolah Perikanan Darat	18	Nilai tukar budidaya	103,14	100,88
17	Terciptanya ketahanan Pangan dan keragaman konsumsi pangan	19	Persentase angka kerawanan pangan ( <i>menurun</i> )	8,86	8,80
18	Meningkatnya kunjungan wisatawan	20	Jumlah kunjungan wisata	22.218	27.438
19	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas daerah dan kawasan perbatasan	21	Persentase peningkatan pemb. panjang jalan	41	48
		22	Persentase peningkatan kualitas jalan	5,87	40
		23	Persentase pengurangan wilayah terisolir	3	5
20	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan sumberdaya air dan irigasi	24	Jumlah ketersediaan air yang dimanfaatkan	12	18
		25	Persentase sumberdaya air yang terjaga	13	23
21	Meningkatnya Prasarana Umum pada kawasan pemukiman/ perumahan,	26	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum	5,60	67,00
		27	Meningkatnya rumah tangga bersanitasi	6,67	61,98
		28	Persentase tertatanya lingkungan kawasan kumuh	1,46	3,12
22	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	29	Tingkat kepuasan masyarakat	20	29
		30	Persentase investasi swasta	12	12
23	Meningkatnya kinerja dan integritas aparatur	31	Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin aparatur	84,00	95,00
24	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik	32	WTP Mandiri	100	100
		33	Ketepatan perencanaan	80	80
25	Terbentuknya Nagari mandiri	34	Tingkat pertumbuhan nagari mandiri	0	0
26	Meningkatnya peran dan penguatan adat dan lembaga adat dalam tata kehidupan masyarakat	35	Peran dan fungsi pemangku lembaga adat	50	68
27	Meningkatkan Pemahaman, Pengembangan dan Pelestarian Nilai – Nilai Kebudayaan Daerah	36	Persentase warisan budaya yang dikelola	60	76,00

